



## **Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia**



### **LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TAHUN ANGGARAN 2007**

Disusun oleh :  
BIRO PERENCANAAN DAN HUKUM  
SEKRETARIAT JENDERAL  
DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
Lt. 20, Gedung Sate Pesona  
Jl. Medan Merdeka Barat 17  
Jakarta 10110  
Tel. 021 383 8572. Fax. 021 386 0931  
[www.budpar.go.id](http://www.budpar.go.id)  
email: monevdepbudpar(at)yahoo.co.id

JAKARTA, MARET 2008  
© Ro Renkum Budpar, 2008

# DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF .....</b>	<b>1</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>4</b>
Latar Belakang .....	4
Gambaran Departemen Kebudayaan dan Pariwisata .....	4
Peran dan Fungsi Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dalam Pembangunan Lintas Sektor .....	8
Akuntabilitas Kinerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata ..	9
<b>BAB II    RENCANA STRATEGIS 2005-2009 .....</b>	<b>10</b>
Peran Strategis Kebudayaan dan Pariwisata dalam Pembangun- an Nasional .....	10
Gambaran Umum Rencana Strategis 2005 – 2009 .....	11
Pernyataan Visi .....	13
Pernyataan Misi .....	13
Tujuan dan Sasaran Strategis .....	14
Program Kebudayaan dan Pariwisata .....	18
<b>BAB III    RENCANA KINERJA 2007 .....</b>	<b>20</b>
Gambaran Umum Rencana Kinerja 2007 .....	21
Program dan Kegiatan 2007 .....	23
Anggaran Kegiatan 2007 .....	25
<b>BAB IV    AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2007 .....</b>	<b>26</b>
Gambaran Umum Akuntabilitas Kinerja 2007 .....	26
Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja 2007 .....	26
Capaian Kinerja 2007 .....	26
Realisasi Keuangan 2007 .....	63
<b>BAB V    PENUTUP .....</b>	<b>65</b>



Departemen Kebudayaan dan Pariwisata

## Kata Pengantar

**P**uji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat rahmat dan karunia-Nya jualah kita dapat menerbitkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2007 ini.



LAKIP ini merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi tentang uraian pertanggungjawaban tentang keberhasilan/ kegagalan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya. Disamping itu, LAKIP juga memuat aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara dana masyarakat yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diterima masyarakat

Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata, sebagaimana telah diketahui, adalah merupakan bagian integral dari pembangunan bangsa yang menempatkan ketahanan budaya dan integritas nasional sebagai dasar pengembangan kebudayaan dan pariwisata di masa yang akan datang, agar mempunyai peran penting dalam rangka membantu mengentaskan bangsa Indonesia keluar dari krisis ekonomi yang berkepanjangan serta memperkuat ketahanan dan keutuhan nasional baik dari konflik horizontal maupun vertikal yang dapat mengarah pada disintegrasi bangsa.

Diharapkan melalui berbagai peristiwa yang terjadi pada tahun 2007 sehingga mempengaruhi perkembangan kebudayaan dan pariwisata dapat memberikan hikmah konsolidasi dan pembenahan di segala aspek. Khususnya dibidang pariwisata, pada tahun 2007 jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia mencapai 5,5 juta merupakan angka tertinggi sejak dimulainya pembangunan pariwisata pada tahun 1969 dalam sistem Repelita. Tentunya keberhasilan pembangunan di jajaran Departemen Kebudayaan dan Pariwisata tidak terlepas dan kerja keras seluruh pihak yang telah bersama-sama merasakan suka dukanya dalam memajukan kebudayaan dan pariwisata. Untuk itu dalam kesempatan ini, saya patut menyampaikan penghargaan dan ucapan

terima kasih yang setinggi-tingginya. Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja.

Jakarta, 28 Maret 2008  
**Menteri Kebudayaan dan Pariwisata**

**IR. JERO WACIK, S.E.**

# Ikhtisar Eksekutif

---

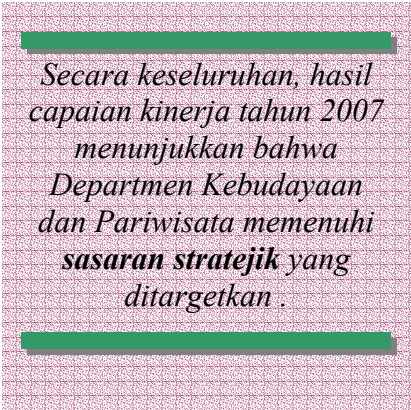
**L**aporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2007 Departemen Kebudayaan dan Pariwisata melaporkan capaian kinerja (*performance results*) selama tahun 2007 dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) 2007 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategik 2005 – 2009. Sesuai dengan rentang waktu rencana Strategik 2005 – 2009 maka LAKIP 2007 ini merupakan LAKIP yang ketiga, oleh sebab itu dalam LAKIP 2007 ini juga berisi informasi capaian kinerja yang relevan dari periode-periode sebelumnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Departemen Kebudayaan dan Pariwisata untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh para *stakeholders* (Presiden, Instansi Pemerintah Pusat/ Daerah, pelaku/industri kebudayaan dan pariwisata). Kedua, Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan sumber informasi bagi Departemen Kebudayaan dan Pariwisata sendiri untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Adanya dua fungsi utama ini memperjelas bahwa informasi yang tertuang dalam LAKIP 2007 harus dapat memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal.

Tahun 2007 masih merupakan tahun yang penuh tantangan bagi bangsa Indonesia dengan beberapa peristiwa yang terjadi dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat, baik terhadap kelangsungan hidup kebudayaan dan integritas bangsa Indonesia maupun terhadap dinamika industri pariwisata Indonesia. Sejak peristiwa tragedi bom Bali I, bencana alam tsunami di Aceh dan Nias, virus SAR dan flu burung, pergolakan di Poso sampai dengan insiden bom di Bali II, ini kita masih dalam upaya dan kerja keras untuk bangkit dengan berbagai program kebudayaan dan pariwisata.

Laporan akuntabilitas kinerja ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja untuk tahun 2007. Rencana Kinerja (*Performance Plan*) 2007 dan Penetapan Kinerja 2007 merupakan sasaran kinerja yang ingin dicapai selama tahun 2007 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategik 2005 – 2009 Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Sementara itu, capaian kinerja (*performance results*) merupakan hasil realisasi seluruh kegiatan selama tahun 2007 yang memang diarahkan bagi pemenuhan target yang ditetapkan dalam rencana kinerja 2007.

Sesuai dengan Rencana Kinerja 2007, selama periode ini Departemen Kebudayaan dan Pariwisata menetapkan **8 (delapan) sasaran strategik**. Selanjutnya sasaran strategik tersebut diwujudkan dalam **9 (sembilan) program** dengan anggaran biaya **Rp 1.025.684.834.000,00**. Secara keseluruhan dapat diinformasikan bahwa, hasil



*Secara keseluruhan, hasil capaian kinerja tahun 2007 menunjukkan bahwa Departemen Kebudayaan dan Pariwisata memenuhi **sasaran strategik** yang ditargetkan.*

capaian kinerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata selama tahun 2007 telah memenuhi **8 (delapan) sasaran strategik** yang ditargetkan. Dengan demikian, *core area* departemen yaitu *mengembangkan kebudayaan dan pariwisata* dapat diwujudkan.

Walaupun demikian program Departemen Kebudayaan dan Pariwisata telah menunjukkan keberhasilan dengan berbagai indikator keberhasilan yang terukur. Hal ini seperti yang ditunjukkan dengan anggaran yang tersedia telah dapat dilaksanakan berbagai program pengembangan bidang kebudayaan yaitu Program Pengembangan Nilai Budaya, Pengelolaan Keragaman Budaya dan Pengelolaan Kekayaan Budaya. Sedangkan pembangunan Pariwisata sendiri mengalami peningkatan terlebih setelah ditambah pemberian **fasilitas Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Visa on Arival) kepada beberapa negara** diantaranya Australia, Timur Tengah, China dan India yang merupakan negara pasar utama dan potensial. Khusus untuk meningkatkan arus wisatawan China, telah dilakukan langkah-langkah mempermudah pengurusan visa, selain di KBRI Beijing dibuka di Guang Zhou dan Shanghai, kedua kota tersebut berpotensi besar jumlah wismanya.

*Salah satu kunci utama penentu keberhasilan ini adalah adanya komitmen yang kuat dari Pimpinan dan seluruh aparatur Departemen Kebudayaan dan Pariwisata*

Salah satu kunci utama penentu keberhasilan ini adalah adanya komitmen yang kuat dari Pimpinan dan seluruh aparatur Departemen Kebudayaan dan Pariwisata untuk menfokuskan pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra 2005 – 2009 dan Renja 2007.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kami untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh sebab itu, sesuai dengan hasil analisis kami atas capaian kinerja 2007 kami merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan Rencana Kinerja Tahun 2007, yaitu sebagai berikut:

1. Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi yang baik diantara unit-unit kerja terkait yang berada dalam lingkungan organisasi Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, instansi pemerintah maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan dibidang Kebudayaan dan Pariwisata.
2. Mengoptimalkan pengelolaan program dan kegiatan yang diikuti dengan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana untuk mewujudkan tujuan dan sasaran-sasaran strategik yang ditetapkan. Hal ini secara khusus akan difokuskan pada sasaran-sasaran strategik yang capaian kinerjanya masih berada di bawah target yang ditetapkan.
3. Secara khusus, berkaitan dengan perumusan Renja 2007 sebagai bentuk penegasan dari Renstra 2005 – 2009, akan dilakukan penelitian yang mendalam atas ketepatan kuantitas target dari indikator kinerja setiap

sasaran strategik yang ditetapkan sehingga dapat menghindarkan adanya capaian kinerja yang sangat ekstrim di masa-masa mendatang.

# Bab I :Pendahuluan

---

## ***Latar Belakang***

---

Pelestarian dan pengembangan kebudayaan dan pariwisata memiliki tujuan untuk menumbuhkan pemahaman dan perkembangan masyarakat terhadap kebudayaan dan pariwisata, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan menumbuhkan sikap kritis terhadap fakta sejarah dan serta memperkuat ketahanan bangsa. Untuk itu disadari bahwa pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata memiliki peran penting dalam memperbaiki struktur kehidupan bangsa apalagi dengan adanya persoalan yang kompleks dan bersifat multidimensional yang saat ini masih berlanjut setelah terjadinya krisis yang berkepanjangan serta meningkatnya ancaman keamanan secara global.

Selain itu, tugas utama pembangunan sektor kebudayaan dan pariwisata adalah agar mampu menjawab agenda prioritas yakni mempercepat pemulihan ekonomi, memperkuat landasan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan yang bersumber kepada sistem ekonomi kerakyatan, serta membangun kesejahteraan rakyat, meningkatkan kualitas kehidupan beragama, dan ketahanan budaya. Sementara itu, melalui program lintas bidang, semua agenda prioritas pembangunan lainnya secara otomatis terkait pula dengan sektor kebudayaan dan pariwisata, terutama sektor penunjang utama pariwisata antara lain investasi dan peningkatan ekspor non migas. Tidak kalah penting pembangunan unsur-unsur penunjang seperti perhubungan, keamanan, imigrasi, bea cukai dan karantina serta unsur-unsur lain yang ada di masyarakat.

## ***Gambaran Departemen Kebudayaan dan Pariwisata***

---

### ***Kelembagaan***

Berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.17/HK.001/MKP-2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana pemerintah, dipimpin oleh Menteri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden serta mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata.

Dalam melaksanakan tugasnya Departemen Kebudayaan dan Pariwisata memiliki fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata;
2. pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
3. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;



4. pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
5. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

Menteri Kebudayaan dan Pariwisata dibantu oleh 11 orang Eselon 1 yang terdiri atas Sekretaris Jenderal; Inspektur Jenderal; 4 orang Direktur Jenderal, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata, serta 4 orang Staf Ahli Menteri.

### **1. Sekretariat Jenderal**

Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi departemen.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- 1) koordinasi kegiatan Departemen;
- 2) penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen;
- 3) penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan Kementerian Koordinator, Kementerian Negara, Departemen lain, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Lembaga lain yang terkait;
- 4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

Di dalam Struktur organisasi Sekretariat Jenderal terdapat 4 Biro dan 1 Pusat yaitu: Biro Perencanaan dan Hukum; Biro Kepegawaian dan Organisasi; Biro Keuangan; Biro Kerjasama Luar Negeri; Biro Umum dan Hubungan Masyarakat; serta Pusat Data dan Informasi.

### **2. Inspektorat Jenderal**

Inspektorat Jenderal dipimpin oleh seorang Inspektur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan departemen. Dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan perumusan kebijakan pengawasan;
- 2) pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk Menteri;
- 3) pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat Jenderal;
- 4) penyusunan laporan hasil pengawasan.

Di dalam Susunan Organisasi Inspektorat Jenderal terdapat 4 Eselon II yaitu: Sekretariat Inspektorat Jenderal; Inspektorat Wilayah I; Inspektorat Wilayah II dan I Inspektorat Wilayah III.

### **3. Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film**

Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri

dan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang nilai budaya, seni dan film. Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan perumusan kebijakan departemen di bidang nilai budaya, seni dan film;
- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang tradisi, pembangunan karakter dan pekerti bangsa, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kesenian, serta perfilman berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) penyusunan standar, norma, kriteria, dan prosedur di bidang tradisi, pembangunan karakter dan pekerti bangsa, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kesenian, serta perfilman;
- 4) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang tradisi, pembangunan karakter dan pekerti bangsa, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kesenian, serta perfilman;
- 5) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.
- 6) Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film meliputi 6 Eselon II yang terdiri atas: Sekretariat Direktorat Jenderal; Direktorat Tradisi; Direktorat Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa; Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa; Direktorat Kesenian; serta Direktorat Perfilman.

#### **4. Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala**

Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sejarah dan purbakala. Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan perumusan kebijakan departemen di bidang sejarah dan purbakala;
- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang nilai sejarah, geografi sejarah, peninggalan bawah air, peninggalan purbakala, dan museum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang nilai sejarah, geografi sejarah, peninggalan bawah air, peninggalan purbakala, dan museum;
- 4) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang nilai sejarah, geografi sejarah, peninggalan bawah air, peninggalan purbakala, dan museum;
- 5) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

Di dalam susunan Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala terdapat 5 Eselon II yaitu: Sekretariat Direktorat Jenderal; Direktorat Nilai Sejarah; Direktorat Geografi Sejarah; Direktorat Peninggalan Bawah Air; Direktorat Peninggalan Purbakala; dan Direktorat Museum.

## **5. Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata**

Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan bertugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengembangan destinasi pariwisata. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan perumusan kebijakan departemen di bidang pengembangan destinasi pariwisata;
- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang produk pariwisata, usaha pariwisata, pemberdayaan masyarakat, dan standarisasi pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) perumusan standar, norma, kriteria, dan prosedur di bidang produk pariwisata, usaha pariwisata, pemberdayaan masyarakat, dan standarisasi pariwisata;
- 4) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang produk pariwisata, usaha pariwisata, pemberdayaan masyarakat, dan standarisasi pariwisata;
- 5) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata dibantu oleh 5 orang pejabat Eselon II yaitu: Sekretaris Direktorat Jenderal; Direktorat Produk Pariwisata; Direktorat Usaha Pariwisata; Direktorat Pemberdayaan Masyarakat; serta Direktorat Standardisasi Pariwisata.

## **6. Direktorat Jenderal Pemasaran**

Direktorat Jenderal Pemasaran dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang mempunyai tugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemasaran. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Pemasaran menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan perumusan kebijakan departemen di bidang pemasaran;
- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pasar, promosi luar negeri, promosi dalam negeri, dan sarana promosi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) penyusunan standar, norma, kriteria, dan prosedur di bidang pengembangan pasar, promosi luar negeri, promosi dalam negeri, dan sarana promosi;
- 4) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan pasar, promosi luar negeri, promosi dalam negeri, dan sarana promosi;
- 5) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

Direktorat Jenderal Pemasaran terdiri atas 5 Eselon II yaitu: Sekretariat Direktorat Jenderal; Direktorat Pengembangan Pasar; Direktorat Promosi Luar Negeri; Direktorat Promosi Dalam Negeri; dan Direktorat Sarana Promosi.

## **7. Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata**

Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur penunjang pelaksana tugas departemen. Dipimpin oleh seorang Kepala, Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Badan Pengembangan Sumber Daya mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang kebudayaan dan pariwisata. Dalam melaksanakan tugas, Badan Pengembangan Sumber Daya Budpar menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan kebudayaan dan pariwisata, serta penelitian dan pengembangan arkeologi;
- 2) perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan SDM di lingkungan Departemen;
- 3) pelayanan teknis administrasi di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya.

Susunan organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari: Sekretariat Badan; Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan; Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional; Pusat Penelitian dan Pengembangan Kepariwisata; Pusat Pengembangan SDM Kebudayaan dan Pariwisata.

## **8. Staf Ahli Menteri**

Staf Ahli Menteri merupakan unsur pembantu Menteri di bidang keahlian tertentu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri mengenai masalah tertentu sesuai dengan bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Badan Pengembangan Sumber Daya.

Staf Ahli Menteri terdiri dari: Staf Ahli Menteri Bidang Pranata Sosial, Staf Ahli Menteri Bidang Multikultural, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga, dan Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

## **Peran dan Fungsi Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dalam Pembangunan Lintas Sektor**

---

Salah satu kontribusi yang dapat diberikan oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata adalah ikut mempercepat proses pemulihan perekonomian nasional melalui stimulasi pembangunan sektor riil yang berkaitan dengan kebudayaan dan pariwisata. Diharapkan dengan bergulirnya kegiatan kebudayaan dan pariwisata, kegiatan riil perekonomian seperti industri transportasi, industri hotel dan akomodasi, industri restoran dan makanan, serta industri kerajinan rakyat dapat mulai berputar secara cepat. Dengan demikian

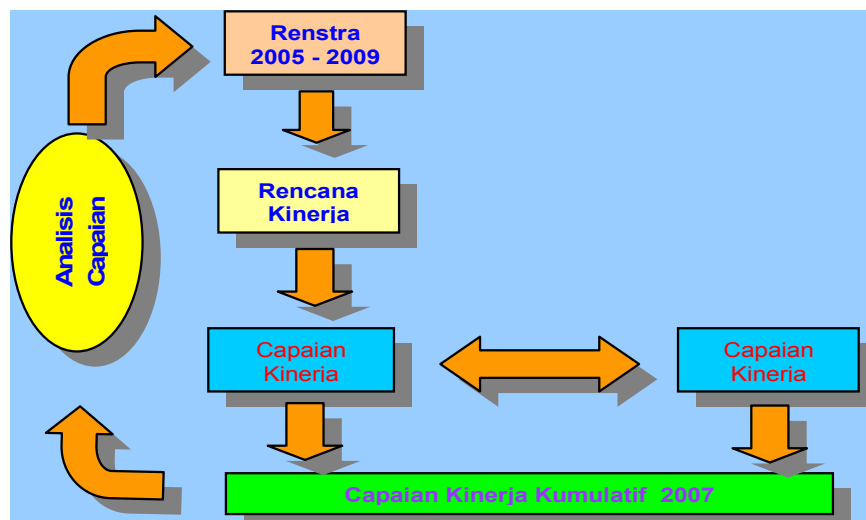
dari gambaran singkat tersebut jelas terlihat peran Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dalam pembangunan lintas sektor nasional. Hal ini merupakan implementasi Renstra tahun 2005 – 2009.

Diharapkan berbagai kajian yang telah dilakukan di daerah konflik maupun daerah yang berpotensi konflik yang hasilnya dapat membantu memecahkan masalah dan memberikan solusi dengan pendekatan berdasar. Sektor pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata tidak dapat berdiri sendiri melainkan juga tergantung pada pembangunan pada sektor-sektor lain yang terkait. Setidaknya, agar pembangunan sektor kebudayaan dan pariwisata memiliki iklim yang kondusif, sektor-sektor ekonomi dan penunjang seperti perhubungan, keamanan, keselamatan, imigrasi, bea dan cukai, karantina dan unsur-unsur terkait dalam masyarakat lainnya harus turut juga memberikan dukungannya.

### ***Akuntabilitas Kinerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata***

Pada dasarnya suatu Laporan Akuntabilitas Kinerja mencoba mengkomunikasikan pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauh mana organisasi publik itu telah melakukan upaya-upaya strategis dan operasional di dalam mencapai tujuan/sasaran strategisnya dalam kerangka pemenuhan visi misi yang telah ditetapkan. Visi dan misi organisasi serta tujuan strategis organisasi telah diformalkan di dalam suatu Renstra yang memiliki rentang waktu 5 tahun. Kemudian untuk capaian yang harus dipenuhi setiap tahunnya dalam periode 5 tahun tersebut, di dalam Renstra ditetapkan sejumlah sasaran strategis. Pemenuhan atas sasaran strategis ini setiap tahunnya akan berakumulasi pada pencapaian tujuan strategis organisasi di akhir tahun kelima. Alur pikirnya adalah apabila tujuan strategis organisasi telah dipenuhi maka organisasi tersebut dapat dipersepsikan telah memenuhi visi dan misinya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) mengkomunikasikan pencapaian kinerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata selama tahun 2007. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2007 dapat diilustrasikan dalam bagan berikut ini :



## Bab II: Rencana Strategis 2005 – 2009

---

### *Peran Strategis Kebudayaan dan Pariwisata dalam Pembangunan Nasional*

---

Pembangunan kebudayaan merupakan prioritas utama dalam menunjang kehidupan berbangsa dan bernegara. Permasalahan-permasalahan yang timbul akhir ini muaranya adalah masalah mental bangsa, sehingga kebudayaan akan dipergunakan sebagai landasan dalam pembangunan watak bangsa (karakter bangsa). Hal ini seperti yang tercantum visi pembangunan kebudayaan dan pariwisata nasional yaitu terwujudnya jati diri bangsa, persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka multikultural, kesejahteraan rakyat dan persahabatan antar bangsa.

Sedangkan pembangunan pariwisata akan mempunyai arti penting dalam pemulihan ekonomi nasional sebagai dampak dari krisis multi dimensi yang pada saat ini menunjukkan adanya perbaikan yang menuju pada kehidupan sudiakala. Namun demikian pembangunan pariwisata tidak dapat dilepaskan dari ketahanan budaya dan integritas nasional karena pembangunan pariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan bangsa. Disamping itu pembangunan kebudayaan pun tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pariwisata, karena bersama pariwisata, prestasi di bidang kebudayaan akan dapat lebih menciptakan nilai tambah baik bagi bangsa serta peradaban dunia. Hubungan keduanya ibarat dua sisi dari satu keping uang.

Pelaksanaan kegiatan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2007 merupakan implementasi dari Renstra Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Nasional tahun 2005 – 2009. Renstra ini disusun berdasarkan landasan idiil Pancasila, landasan konstitusional UUD 1945, landasan operasional PP No. 7 tentang Program Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004 – 2009, Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Keppres Nomor 9 tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.

Selain itu, Rencana Strategis Departemen Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2005 – 2009 didalamnya termuat empat arah kebijakan yaitu:

1. Mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi pembangunan kebudayaan dan pariwisata;
2. Meningkatkan efektivitas peran sebagai regulator dan fasilitator dalam pembangunan kebudayaan dan pariwisata;
3. memantapkan kerjasama dalam dan luar negeri di bidang kebudayaan dan pariwisata;
4. memantapkan manajemen pembangunan kebudayaan dan pariwisata.

## **Gambaran Umum Rencana Strategis 2005 – 2009**

---

Prioritas pembangunan kebudayaan diarahkan untuk **MENGEMBANGKAN KEBUDAYAAN YANG BERLANDASKAN PADA NILAI-NILAI LUHUR** dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (1) mendorong terciptanya wadah yang terbuka dan demokratis bagi dialog kebudayaan agar benturan-benturan yang terjadi tidak melebar menjadi konflik sosial; (2) mendorong tuntasnya proses modernisasi yang dicirikan dengan terwujudnya Negara Kebangsaan Indonesia modern yang berkelanjutan, dan menguatnya masyarakat sipil; (3) revitalisasi nilai-nilai kearifan lokal sebagai salah satu dasar pengembangan etika pergaulan sosial untuk memperkuat identitas nasional; serta (4) meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap budaya dan produk-produk dalam negeri. Serta memperkuat harmoni yang ada dan mencegah tindakan-tindakan yang menimbulkan ketidakadilan sehingga terbangun masyarakat sipil yang kokoh, termasuk membangun kembali kepercayaan sosial antarkelompok masyarakat; dan memperkuat dan mengartikulasikan identitas bangsa.

Disamping itu **sasaran pengembangan kebudayaan** dalam **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004 – 2009** adalah:

1. Menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antar kelompok masyarakat.
2. Semakin kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika;
3. Semakin berkembangnya penerapan nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya nasional yang terwujud dalam setiap aspek kebijakan pembangunan; dan
4. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya.

Secara lebih terfokus sasaran kebudayaan yang telah ditetapkan dalam RPJMN diatas telah dijabarkan dalam Rencana Strategis Pembangunan Kebudayaan dan Kepariwisata Nasional untuk tahun 2005 – 2009 yaitu:

1. Terwujudnya **kesadaran masyarakat** untuk **melestarikan kebudayaan** sehingga **memiliki ketahanan dalam menghadapi pengaruh budaya yang negatif**.
2. Terwujudnya **industri** dan **karya budaya** yang mengacu pada budaya bangsa, dan perlindungan hukum individual dan komunal.
3. Terwujudnya **sikap saling menghargai** dan **menghormati di antara berbagai komunitas budaya** untuk memperkukuh **ikatan kebangsaan**.

Di bidang pembangunan pariwisata, potensi dan peranannya sebagai salah satu sektor penghasil devisa utama senantiasa terus ditingkatkan. Jumlah perolehan devisa ditentukan oleh jumlah kunjungan, pengeluaran, dan lama kunjungan wisatawan mancanegara di Indonesia, maka salah satu sasaran keberhasilan pengembangan pariwisata, sebagai sumber penghasil devisa dinilai dari beberapa unsur yaitu:

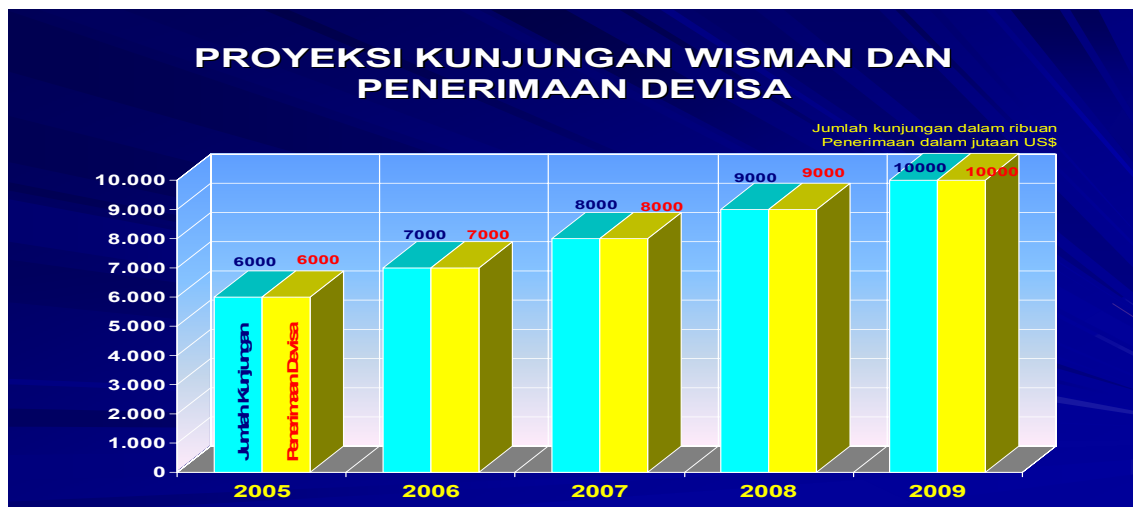
1. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (*foreign tourist*);
2. Pengeluaran wisatawan mancanegara (*foreign tourist expenditures*) per wisatawan, per hari dan per kunjungan;

### 3. Lama tinggal wisatawan mancanegara (*foreign tourist length of stay*).

Apabila kita melihat tren pariwisata tahun 2020, perjalanan wisata dunia akan mencapai 1,6 milyar orang, di antaranya 438 juta orang akan berkunjung ke kawasan Asia-Pasifik dan 100 juta orang ke Cina. Melihat jumlah yang demikian besar wisatawan, maka Indonesia yang dapat menawarkan segala daya tariknya untuk mendatangkan wisatawan, perlu merebut pangsa pasar wisata tersebut.

Untuk mengukur kinerja pembangunan pariwisata dengan mengacu kepada aspek ekonomi, sejak tahun 2001 telah dilakukan penghitungan menggunakan metodologi dari *World Tourism Organization (WTO)* yaitu Neraca Satelit Pariwisata Nasional yang secara garis besar adalah pada tahun 2003 jumlah pendapatan dari kepariwisataan mencapai hampir Rp 125 trilyun dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 7,52 juta orang (Nesparnas 2003, 2004), maka diperkirakan pada tahun 2009 jumlah pendapatan dari kepariwisataan akan mencapai lebih dari Rp 225 trilyun dengan penyerapan tenaga kerja lebih dari 12,5 juta orang. Dengan menggunakan data Nesparnas 2003 sebagai acuan, maka pada tahun 2009 diperkirakan tercipta perputaran uang (sebagai akibat dari *multiplier effect*) sebesar Rp 337,5 trilyun.

#### PROYEKSI KUNJUNGAN WISMAN & PEROLEHAN DEWISA TAHUN 2005 – 2009



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004 – 2009 menjelaskan bahwa salah satu sasaran untuk meningkatkan sektor non migas adalah dengan meningkatkan kontribusi pariwisata dalam perolehan devisa menjadi sekitar US\$ 10 miliar pada tahun 2009, sehingga sektor pariwisata diharapkan mampu menjadi salah satu penghasil devisa besar. Berdasarkan hal tersebut maka kebijakan pembangunan kepariwisataan diarahkan untuk **meningkatkan efektivitas pemasaran melalui kegiatan promosi dan pengembangan produk-produk wisata serta meningkatkan sinergi dalam jasa pelayanan pariwisata.**

Dari sasaran dalam RPJMN 2004 – 2009 maka telah ditetapkan juga sasaran pembangunan kepariwisataan nasional seperti yang termuat dalam



dokumen Rencana Strategis Pembangunan Kebudayaan dan Kepariwisata Nasional 2005 – 2009 yaitu:

1. Terwujudnya **pariwisata nusantara** yang dapat mendorong **cinta tanah air**.
2. Meningkatnya **pemerataan dan keseimbangan pengembangan destinasi pariwisata** yang sesuai dengan potensi masing-masing daerah.
3. Meningkatnya **kontribusi pariwisata dalam perekonomian nasional**.
4. Meningkatnya **produk pariwisata yang memiliki keunggulan kompetitif**.
5. Meningkatnya **pelestarian lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat**.

## **Pernyataan Visi**

---

Berdasarkan latar belakang dan landasan pemikiran yang telah dikemukakan di depan, maka telah tergambar keinginan bangsa Indonesia dalam pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan nasional yang merupakan salah satu penjabaran dari Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Berbagai dasar pemikiran telah dirumuskan sebagai rambu-rambu di dalam Pembangunan Kebudayaan dan Kepariwisata Nasional pada masa mendatang yang penuh dengan harapan dan tantangan, yang harus dipedomani oleh insan kebudayaan dan kepariwisataan untuk lebih berperan dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berencana dan berkesinambungan.

Untuk itu Departemen Kebudayaan dan Pariwisata yang merupakan salah satu pelaku pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan nasional merumuskan Visi sebagai berikut:

**“TERWUJUDNYA JATIDIRI BANGSA, PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA DALAM KERANGKA MULTIKULTURAL, KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PERSAHABATAN ANTARBANGSA ”**

## **Pernyataan Misi**

---

Dalam mengimplementasikan visi pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan tersebut di atas, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dengan berpedoman pada tugas pokok dan fungsi sebagai regulator dan fasilitator dalam pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan yang transparan, akuntabel dan mengutamakan kepentingan masyarakat, tahun 2005 – 2009 ini mempunyai misi sebagai berikut adalah:

1. Melakukan pelestarian dan pengembangan kebudayaan yang berlandaskan nilai luhur.
2. Mendukung pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata yang berdaya saing global.
3. Melakukan pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata.
4. Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, dan akuntabel.

## ***Tujuan dan Sasaran Strategis***

---

Berdasarkan visi dan misi maka ditetapkan tujuan pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan tahun 2005 – 2009 sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas manusia Indonesia yang berbudi pekerti luhur beserta hasil karyanya.
2. Meningkatnya kemandirian dan daya saing dalam perekonomian nasional.
3. Meningkatnya pemerataan pembangunan.
4. Meningkatnya perlindungan pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan budaya.
5. Meningkatnya persatuan dan cinta tanah air serta kerjasama internasional.

Adapun sasaran strategis yang merupakan penjabaran dari tujuan adalah :

1. Terwujudnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan kebudayaan sehingga memiliki ketahanan dalam menghadapi pengaruh budaya yang negatif.
2. Terwujudnya industri dan karya budaya yang mengacu pada budaya bangsa, dan perlindungan hukum hak atas individual dan komunal.
3. Terwujudnya sikap saling menghargai dan menghormati diantara berbagai komunitas budaya untuk memperkuat ikatan kebangsaan.
4. Terwujudnya pariwisata nusantara yang dapat mendorong rasa cinta tanah air.
5. Meningkatnya pemerataan dan keseimbangan pengembangan destinasi pariwisata yang sesuai dengan potensi masing-masing daerah.
6. Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian nasional.
7. Meningkatnya produk dan pelayanan pariwisata yang memiliki keunggulan kompetitif.
8. Meningkatnya pelestarian lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat.
9. Meningkatnya peran Indonesia dalam kerjasama dan persahabatan antar bangsa dengan dilandasi oleh sikap saling menghargai.
10. Terwujudnya hasil penelitian dan pengembangan terapan serta sistem informasi bidang kebudayaan dan kepariwisataan.
11. Meningkatnya pengembangan sumber daya manusia (SDM) bidang kebudayaan dan kepariwisataan.
12. Terwujudnya pengawasan dan pengendalian, koordinasi dan kerjasama lintas daerah serta antar *stakeholders*.

Penetapan tujuan strategis Departemen Kebudayaan dan Pariwisata pada umumnya didasarkan pada isu-isu strategis. Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang dan mengarahkan perumusan sasaran, program, serta kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sasaran strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dalam kurun waktu satu tahun. Penetapan sasaran dirumuskan lebih spesifik, terukur, berorientasi pada hasil, dapat dicapai, dan

memiliki kurun waktu satu tahun. Dalam sasaran dirancang pula **indikator pencapaian sasaran**, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang telah diidentifikasi untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan dan disertai dengan targetnya masing-masing.

Masing-masing tujuan mempunyai sasaran yang diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu perencanaan strategis secara berkelanjutan (*sustainable*) dan memiliki dukungan secara nyata terhadap tujuan yang ditetapkan di dalam rencana strategis. Sasaran strategis Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dalam kurun waktu tahun 2005 – 2009 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 3. Tujuan dan Sasaran Strategis  
Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2005 – 2009**

Tujuan		Sasaran		Program
		Uraian	Indikator Kinerja	
1.	Meningkatnya kualitas manusia Indonesia yang berbudi pekerti luhur beserta hasil karyanya	1.1. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan kebudayaan sehingga memiliki ketahanan dalam menghadapi pengaruh budaya yang tidak sesuai dengan nilai luhur budaya bangsa Indonesia	1.1.1. Jumlah data kebudayaan yang berhasil diinventarisasi dan didokumentasikan	Pengembangan Nilai Budaya
			1.1.2. Jumlah pengunjung Museum	
			1.1.3. Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya, baik di darat maupun di bawah air serta obyek budaya yang dilestarikan	
			1.1.4. Jumlah organisasi dan pemerhati kebudayaan	
			1.1.5. Menurunnya kasus pelanggaran cagar budaya	
			1.1.6. Jumlah aktivitas/ event kebudayaan	
		1.2. Meningkatnya industri dan karya budaya yang mengacu pada budaya bangsa	1.2.1. Jumlah produk dan karya budaya yang memiliki nilai ilmu pengetahuan, sosial budaya, dan ekonomi tinggi serta diakui ditingkat nasional	

Tujuan		Sasaran				Program	
		Uraian		Indikator Kinerja			
					dan internasional		
				1.2.2.	Jumlah penghargaan yang diberikan kepada masyarakat yang berjasa dalam perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan		
		1.3.	Terwujudnya sikap saling menghargai dan menghormati di antara berbagai komunitas budaya bangsa dan perlindungan hukum individual dan komunal	1.3.1.	Menurunnya konflik etnis dan sosial yang disebabkan oleh budaya		Pengelolaan kekayaan budaya
				1.3.2.	Meningkatnya jumlah kerjasama lintas budaya		
				1.3.3.	Kenaikan jumlah komunitas antar budaya		
		1.3.4.	Jumlah karya budaya bangsa yang mendapat perlindungan hukum				
2.	Meningkatnya kemandirian dan daya saing kepariwisataan dalam perekonomian nasional	2.1.	Meningkatnya pariwisata nusantara	2.1.1.	Persentase pertumbuhan wisatawan manca negara per tahun	Pengembangan pemasaran pariwisata	
				2.2.1.	Jumlah Wisatawan Mancanegara		
				2.2.3.	Persentase pertumbuhan wisatawan nusantara per tahun		
				2.2.4.	Jumlah Wisatawan Nusantara (Wisnus)		
				2.2.5.	Jumlah pengeluaran wisnus/wisman		
				2.2.6.	Pertambahan jumlah propinsi/ kabupaten/ kota yang menjadi tempat kunjungan		

Tujuan		Sasaran				Program
		Uraian		Indikator Kinerja		
					wisnus/wisman	
		2.2.	Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian	2.2.1.	Kenaikan jumlah devisa dari wisman	Pengembangan pemasaran pariwisata
				2.2.2.	Persentase peningkatan kontribusi pariwisata dalam perekonomian nasional	
		2.3.	Meningkatnya produk dan pelayanan pariwisata yang memiliki keunggulan kompetitif	2.3.1.	Kenaikan peringkat Indeks Pelayanan Pariwisata	Pengembangan destinasi pariwisata
				2.3.2.	Turunnya kasus eksploitasi anak dan seks komersial di lingkungan pariwisata	
				2.3.3.	Pertambahan jenis pelayanan di pintu masuk	
				2.3.4.	Jumlah peningkatan aksesibilitas dan fasilitas di setiap destinasi	
				2.3.5.	Jumlah produk dan pelayanan pariwisata yang menerapkan kode etik pariwisata dunia	
				2.3.6.	Kenaikan jumlah even pariwisata yang berpola kemitraan	
				2.3.7.	Persentase meningkatnya jumlah organisasi/ perorangan yang berusaha dibidang pariwisata	
3.	Meningkatnya pemerataan pembangunan	3.1.	Meningkatnya pemerataan dan keseimbangan pengembangan destinasi	3.1.1.	Peningkatan jenis destinasi ekowisata	Pengembangan destinasi pariwisata
				3.1.2.	Peningkatan jenis destinasi wisata bahari	

Tujuan		Sasaran		Program
		Uraian	Indikator Kinerja	
		pariwisata yang sesuai dengan potensi masing-masing daerah	3.1.3. Peningkatan jenis destinasi konvensi (MICE)	
4.	Meningkatnya persatuan dan cinta tanah air serta kerjasama internasional.	4.1. Meningkatkan peran Indonesia dalam kerjasama dan persahabatan antar bangsa dengan dilandasi oleh sikap saling menghargai	4.1.1. Peningkatan jumlah kerjasama internasional dibidang budaya dan pariwisata	Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan
			4.1.2. Jumlah investasi baru di bidang pariwisata	
			4.1.3. Jumlah implementasi hasil kesepakatan kerjasama multilateral, bilateral, sub regional di bidang pariwisata	

### ***Program Kebudayaan dan Pariwisata***

Dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan kebudayaan dan pariwisata yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional serta Rencana Strategis Pembangunan Kebudayaan dan Kepariwisata Nasional, program pembangunan kebudayaan dan pariwisata yang akan dilaksanakan oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata di tahun 2005 – 2009 terdiri atas 9 program pokok yaitu:

#### **1. Program Pengembangan Nilai Budaya**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan apresiasi masyarakat Indonesia atas nilai-nilai budaya yang tumbuh di seluruh daerah sebagai dasar dalam pembangunan yang berwawasan kebudayaan.

#### **2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya**

Program ini terutama ditujukan untuk meningkatkan peranserta dan apresiasi masyarakat di bidang perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan seni dan film.

#### **3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan upaya-upaya penanaman nilai-nilai kekayaan budaya Indonesia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**4. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata**

Program ini bertujuan untuk menumbuhkembangkan dan meningkatkan daya saing global destinasi, produk dan usaha pariwisata nasional.

**5. Program Pengembangan Pemasaran**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pangsa pasar industri kebudayaan dan pariwisata Indonesia melalui berbagai upaya pemasaran dan promosi terpadu, baik yang dilaksanakan di dalam maupun di luar negeri, untuk memantapkan citra Indonesia di dunia internasional dalam rangka mendorong peningkatan apresiasi industri budaya nasional, peningkatan arus kunjungan wisatawan mancanegara dan peningkatan pariwisata nusantara.

**6. Program Peningkatan Kemitraan**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya dan kerjasama antar lembaga guna mendukung pembangunan kebudayaan dan pariwisata nasional.

**7. Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan**

Program ini diarahkan untuk mendukung pengelolaan operasional kantor Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.

**8. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**

Program ini ditujukan untuk mendorong terwujudnya manajemen pembangunan kebudayaan dan pariwisata dan keterpaduan gerak antar *stakeholders* dan pelaku pembangunan lainnya dalam mendorong pembangunan kebudayaan dan pariwisata nasional.

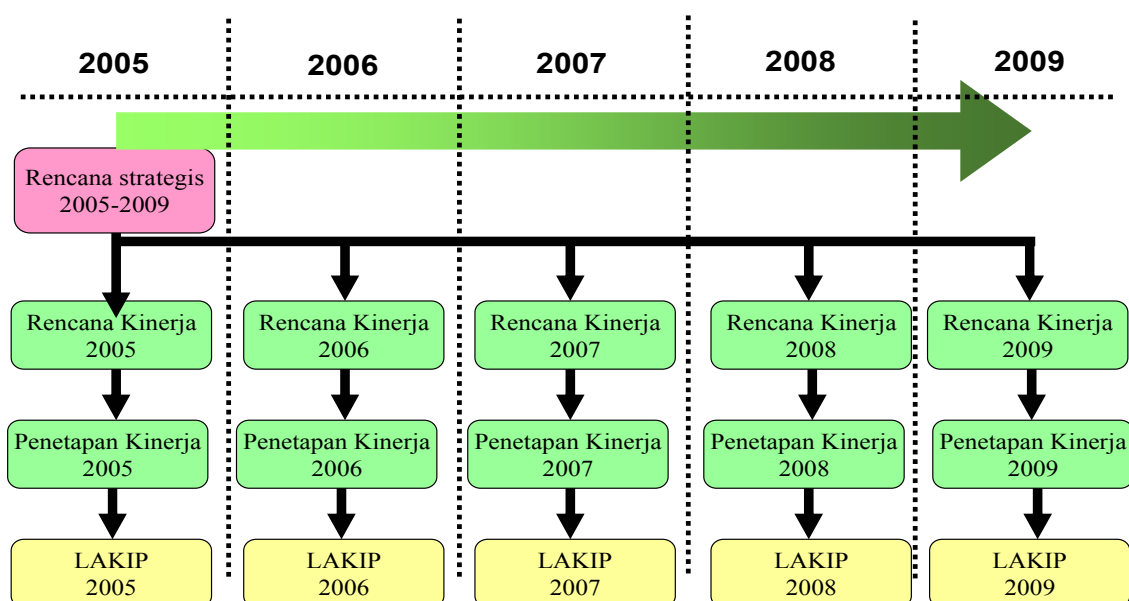
**9. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara**

Program pengawasan aparatur negara untuk mewujudkan *good governance* dan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang kebudayaan dan pariwisata.

## Bab III: Rencana Kinerja 2007

Proses penjabaran dari Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2005 – 2009, yang akan dilaksanakan oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata melalui berbagai kegiatan secara tahunan termasuk didalamnya adalah perencanaan kinerja 2007 yang merupakan proses perencanaan kinerja yang didokumentasikan dalam Rencana Kinerja Tahunan (*Annual Performance Plan*). Di dalam Rencana Kinerja Tahunan ditetapkan target kinerja tahun 2007 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Departemen Kebudayaan dan Pariwisata untuk mencapainya dalam tahun 2007. Hubungan antara rencana kinerja tahunan, penetapan kinerja, dan LAKIP dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

### Hubungan Rencana Kinerja, Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja (LAKIP) dalam Sistem AKIP



Dengan demikian, Rencana Kinerja 2007 Departemen Kebudayaan dan Pariwisata merupakan dokumen yang menyajikan target kinerja untuk tahun 2007 dan merupakan bentuk komitmen penuh organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi.



## Gambaran Umum Rencana Kinerja 2007

### Sasaran Strategis 2007

Sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun 2007 dapat dilihat pada tabel berikut :

Uraian Sasaran		Indikator		Target Tahun 2007
1.1.	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan kebudayaan sehingga memiliki ketahanan dalam menghadapi pengaruh budaya yang tidak sesuai dengan nilai luhur budaya bangsa Indonesia	1.1.1.	Jumlah data kebudayaan yang berhasil diinventarisasi dan didokumentasikan	71 naskah, 8 judul film, dan 7 judul buku
		1.1.2.	Jumlah pengunjung Museum	242.858 orang
		1.1.3.	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya, baik di darat maupun di bawah air serta obyek budaya yang dilestarikan	7.375 BCB/Situs
		1.1.4.	Jumlah organisasi dan pemerhati kebudayaan	35 unit
		1.1.5.	Menurunnya kasus pelanggaran cagar budaya	15 kasus
		1.1.6.	Jumlah aktivitas/event kebudayaan	41 kali
2.1.	Meningkatnya industri dan karya budaya yang mengacu pada budaya bangsa	2.1.1.	Jumlah produk dan karya budaya yang memiliki nilai ilmu pengetahuan, sosial budaya, dan ekonomi tinggi serta diakui ditingkat nasional dan internasional	7 skenario film, 10 performer, dan 5 lukisan
		2.1.2.	Jumlah penghargaan yang diberikan kepada masyarakat yang berjasa dalam perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan	4 kegiatan
3.1.	Terwujudnya sikap saling menghargai dan menghormati di antara berbagai komunitas budaya bangsa dan perlindungan hukum individual dan komunal	3.1.1.	Menurunnya konflik etnis dan sosial yang disebabkan oleh budaya	44 kegiatan
		3.1.2.	Meningkatnya jumlah kerjasama lintas budaya	3 kegiatan
		3.1.3.	Kenaikan jumlah komunitas antar budaya	3 kegiatan
		3.1.4.	Jumlah karya budaya bangsa yang mendapat perlindungan hukum	2 karya

Uraian Sasaran		Indikator		Target Tahun 2007
4.1.	Meningkatnya pariwisata nusantara	4.1.1.	Persentase pertumbuhan wisatawan manca negara per tahun	1,50 %
		4.1.2.	Jumlah Wisatawan Mancanegara	6 juta
		4.1.3.	Persentase pertumbuhan wisatawan nusantara per tahun	9,09 %
		4.1.4.	Jumlah Wisatawan Nusantara (Wisnus)	220 juta
		4.1.5.	Jumlah pengeluaran wisnus/wisman	79,85 triliun
		4.1.6.	Pertambahan jumlah propinsi/kabupaten/kota yang menjadi tempat kunjungan wisnus/wisman	--
5.1.	Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian	5.1.1.	Kenaikan jumlah devisa dari wisman	6 miliar US\$
		5.1.2.	Persentase peningkatan kontribusi pariwisata dalam perekonomian nasional	6 %
6.1.	Meningkatnya produk dan pelayanan pariwisata yang memiliki keunggulan kompetitif	6.1.1.	Kenaikan peringkat Indeks Pelayanan Pariwisata	0 %
		6.1.2.	Turunnya kasus eksploitasi anak dan seks komersial di lingkungan pariwisata	0 %
		6.1.3.	Pertambahan jenis pelayanan di pintu masuk	15 pintu masuk
		6.1.4.	Jumlah peningkatan aksesibilitas dan fasilitas di setiap destinasi	10 kali
		6.1.5.	Jumlah produk dan pelayanan pariwisata yang menerapkan kode etik pariwisata dunia	5 paket
		6.1.6.	Kenaikan jumlah even pariwisata yang berpola kemitraan	4 %
		6.1.7.	Persentase meningkatnya jumlah organisasi/perorangan yang berusaha dibidang pariwisata	1 %

Uraian Sasaran		Indikator		Target Tahun 2007
7.1.	Meningkatnya pemerataan dan keseimbangan pengembangan destinasi pariwisata yang sesuai dengan potensi masing-masing daerah	7.1.1.	Peningkatan jenis destinasi ekowisata	5 kali
		7.1.2.	Peningkatan jenis destinasi wisata bahari	5 kali
		7.1.3.	Peningkatan jenis destinasi konvensi (MICE)	5 kali
8.1.	Meningkatnya peran Indonesia dalam kerjasama dan persahabatan antar bangsa dengan dilandasi oleh sikap saling menghargai	8.1.1.	Peningkatan jumlah kerjasama internasional dibidang budaya dan pariwisata	20 kali
		8.1.2.	Jumlah investasi baru di bidang pariwisata	1 kali
		8.1.3.	Jumlah implementasi hasil kesepakatan kerjasama multilateral, bilateral, sub regional di bidang pariwisata	92 %

### Program dan Kegiatan 2007

Pada awal tahun 2005, struktur organisasi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata telah berubah menjadi Departemen Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia tanggal 31 Januari 2005 dan Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia serta diperkuat oleh Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor B/768/M.PAN/4/2005 tanggal 27 April 2005 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.

Hal ini menjadikan tugas, pokok dan fungsi pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata mengalami perubahan yang signifikan dan ikut mempengaruhi perumusan kebijakan yang akan dilakukan di tahun 2005 sampai dengan 2009, seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2007:

#### 1. Kebijakan Pembangunan Bidang Kebudayaan

Kebijakan yang dilakukan dalam memajukan pembangunan kebudayaan adalah:

- mengembangkan budaya kritis masyarakat secara konstruktif sehingga dapat menumbuhkan kontrol sosial yang produktif;
- Meningkatkan upaya untuk mempercepat sosialisasi dan kulturisasi Etika Kehidupan Berbangsa;

- c. Mengembangkan industri-industri budaya, termasuk di dalamnya adalah upaya revitalisasi modal sosial dan modal budaya untuk keperluan pengembangan usaha perekonomian;
- d. Mengembangkan dan memperkuat jatidiri bangsa, pengelolaan keragaman budaya, dan pengembangan berbagai wujud ikatan kebangsaan.

## **2. Kebijakan Pembangunan Bidang Kepariwisata**

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004 – 2009, arah kebijakan pengembangan pariwisata dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara dengan fokus pada upaya:

- a. Meningkatkan efektivitas promosi pariwisata, baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Pengembangan jenis dan kualitas produk-produk wisata, terutama pengembangan wisata bahari yang potensinya sangat besar;
- c. Harmonisasi dan simplifikasi berbagai perangkat peraturan yang terkait di dalam mendukung pengembangan pariwisata, termasuk di dalamnya wisata bahari, dan
- d. Optimalisasi dan sinkronisasi dalam pengelolaan jasa pelayanan pariwisata, terutama yang melibatkan lebih dari satu moda transportasi.

Untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2007 Departemen Kebudayaan dan Pariwisata telah menyusun rencana kerja yang terdiri dari 9 program pokok yang akan menjadi inti dari pembangunan kebudayaan dan pariwisata di Tahun Anggaran 2007. Rencana Kerja ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan kebudayaan dan pariwisata oleh berbagai pihak terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah, meliputi :

- 1) Program Pengembangan Nilai Budaya
- 2) Program Pengelolaan Keragaman Budaya
- 3) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
- 4) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
- 5) Program Pengembangan Pemasaran
- 6) Program Peningkatan Kemitraan
- 7) Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan
- 8) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
- 9) Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara

## Anggaran Kegiatan 2007

---

Anggaran Pembangunan dan Belanja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata untuk Tahun Anggaran 2007 telah dialokasikan sebesar Rp 1.025.684.834.000,00 yang dipergunakan untuk 3 (tiga) jenis belanja sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai : Rp 240.693.403.000,00
2. Belanja Barang : Rp 624.364.787.000,00
3. Belanja Modal : Rp 147.593.184.000,00
4. Bantuan Sosial : Rp 13.033.460.000,00

Berdasarkan program kebudayaan dan kepariwisataan yang telah dilaksanakan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun 2007 rincian alokasi anggarannya adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	PAGU
1.	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	170.399.620.000
2.	Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan	316.177.050.000
3.	Program Pengembangan Nilai Budaya	49.154.995.000
4.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	50.010.334.000
5.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	93.742.714.000
6.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	80.215.400.000
7.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	163.807.165.000
8.	Program Peningkatan Kemitraan	94.902.081.000
9.	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara	7.275.475.000
	<b>Total</b>	<b>1.025.684.834.000</b>

## Bab IV: Akuntabilitas Kinerja 2007

---

### *Gambaran Umum Akuntabilitas Kinerja 2007*

---

Pada tahun 2007 bidang kebudayaan, sasaran utama masih terfokus pada peningkatan pembangunan karakter bangsa yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur dalam kehidupan multikultural yang telah diwujudkan dengan baik, melalui upaya berbagai aktivitas yang berkaitan dengan kebudayaan. Di bidang pariwisata, peran pemasaran telah dilaksanakan dengan baik melalui kegiatan promosi dalam negeri yang ditujukan untuk mempromosikan produk wisata dan mendorong minat masyarakat untuk melakukan perjalanan wisata dalam negeri. Demikian juga bidang pemasaran luar negeri telah dilaksanakan dengan baik sebagai upaya memperkenalkan pariwisata Indonesia sekaligus pemulihan citra positif Indonesia di dunia internasional.

### *Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja 2007*

---

Tahun 2007 merupakan tahun kedua dari Rencana Strategis Jangka Menengah Nasional Tahun 2005 – 2009. Adapun metode yang digunakan adalah membandingkan capaian antar berbagai komponen sasaran sehingga diperoleh tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing sasaran. Berdasarkan perbandingan capaian ini dapat diperoleh informasi menyangkut masing-masing sasaran sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program di masa mendatang sehingga setiap program yang direncanakan dapat berhasil guna dan berdaya guna. Langkah-langkah yang dilakukan adalah dengan terlebih dahulu membandingkan antara rencana kerja dengan realisasi untuk masing-masing komponen sasaran sehingga diperoleh capaian tiap komponen dengan rata-rata seluruh sasaran.

Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal dan internal tentang sejauhmana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

### *Capaian Kinerja 2007*

---

Ditinjau dari capaian kinerja masing-masing sasaran untuk tahun 2007, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Berikut ini akan diuraikan kinerja dari Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dilihat dari masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan.

**Sasaran 1: Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melestarikan kebudayaan sehingga memiliki ketahanan dalam menghadapi pengaruh budaya yang tidak sesuai dengan nilai luhur budaya bangsa Indonesia**

Pembangunan kebudayaan mempunyai andil yang besar dalam membangun watak dan bangsa yang berbudaya (*nations and character building*) menuju masyarakat yang madani/modern (*civilized society*). Peran strategis tersebut masih mempunyai makna bagi pembangunan kebudayaan Indonesia masa depan, mengingat kehidupan bangsa masih dihadapkan pada masalah disintegrasi bangsa dan kesatuan negara, serta menghadapi dekadensi massal dalam berbagai perwujudannya dalam masyarakat.

Dalam kerangka tersebut, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata akan memberikan peran dan kontribusi dalam rangka memperkuat pertahanan budaya masyarakat tersebut dengan menetapkan kesadaran masyarakat sebagai salah satu sasaran yang akan dicapai dalam perencanaan strategik lima tahunan yang telah ditetapkan dengan indikator kinerjanya sebagai berikut:

No.	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah data kebudayaan yang berhasil diinventarisasi dan didokumentasikan	71 naskah, 8 judul film, dan 7 judul buku	71 naskah, 8 judul film, dan 7 judul buku	100
2.	Jumlah pengunjung museum	242.858 orang	110.476 orang	45,48
3.	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya, baik di darat maupun di bawah air serta obyek budaya yang dilestarikan	7.375 BCB dan Situs	7.375 BCB dan Situs	100
4.	Jumlah organisasi dan pemerhati kebudayaan	35 unit	35 unit	100
5.	Menurunnya kasus pelanggaran cagar budaya	15 kasus	12 kasus	80
6.	Jumlah aktivitas/event kebudayaan	41 kali	41 kali	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target-target indikator-indikator *output* dan *outcome* yang digunakan untuk dapat mengukur pencapaian sasaran ini sebagian besar sudah dapat dipenuhi dengan tingkat capaian 100%. Indikator-indikator yang belum mencapai target adalah “jumlah pengunjung museum” yang mendapatkan capaian sebesar 45,48% dan indikator “menurunnya kasus pelanggaran cagar budaya” yang medapat capaian sebesar 80%. Tidak tercapainya target jumlah pengunjung museum lebih disebabkan karena semakin banyaknya serbuan dari berbagai media lain yang dapat dengan mudah di akses oleh pihak-pihak yang dulunya merupakan pengunjung museum misalnya media entertainment yang juga memberikan pembelajaran

mengenai sejarah serta media lainnya. Pengelola museum telah berupaya untuk meningkatkan kinerjanya dengan melakukan berbagai kegiatan atau program yang ditujukan untuk dapat menarik perhatian dari berbagai kalangan untuk datang berkunjung ke museum. Upaya tersebut terlihat dari upaya penyimpanan, perawatan, pengamanan, pendokumentasian dan penyajian koleksi di museum yang dilakukan dengan berbagai kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Naskah Perawatan Koleksi Organik
2. Penyusunan Pedoman Museum di Indonesia
3. Penyempurnaan Naskah Pedoman Museum Situs
4. Penyempurnaan Naskah Museum Maritim
5. Peningkatan Kualitas Tenaga Museum
6. Penerbitan Majalah Ilmu Permuseum Museografika
7. Monografi Museum di Indonesia
8. Peningkatan Apresiasi Masyarakat Terhadap Museum
9. Penyuluhan Pengelolaan Museum
10. Dukungan Penyebarluasan Informasi Pameran "Record of the Hidden Base of Borobudur" dan "Manusia Flores"
11. Bantuan Museum Daerah (4 museum)
12. Penataan Diorama Museum Sejarah Tugu Nasional
13. Rapat Koordinasi Museum Seluruh Indonesia
14. Pengadaan Alat Pengolah Data
15. Evaluasi dan Pemberdayaan Museum Daerah

Selain dari itu, apabila dilihat dari *trend* kinerja dari tahun 2005 sampai tahun 2007 dapat dilihat adanya beberapa indikator yang mengalami penurunan namun demikian juga terdapat beberapa indikator yang mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No.	Indikator	2005	2006	2007
1.	Jumlah data kebudayaan yang berhasil diinventarisasi dan didokumentasikan	22 naskah	41 naskah	71 naskah, 8 film, 7 judul buku
2.	Jumlah pengunjung Museum	--	--	110.476 orang
3.	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya, baik di darat maupun di bawah air serta obyek budaya yang dilestarikan	--	--	7.375 BCB/ Situs
4.	Jumlah organisasi dan pemerhati kebudayaan	21 unit	3 unit	35 unit
5.	Menurunnya kasus pelanggaran cagar budaya	5 %	5 %	12 kasus
6.	Jumlah aktivitas/event kebudayaan	7 kali	9 kali	41 Kali



Dari tabel tersebut dapat diungkapkan bahwa telah terdapat kemajuan yang berarti dalam proses penyelamatan dan pelestarian sejarah sebagaimana yang telah dilakukan oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata selama tiga tahun terakhir. Data kebudayaan yang dapat diinventarisasi serta didokumentasikan terus meningkat sejalan dengan peningkatan aktivitas-aktivitas di bidang kebudayaan yang telah dilaksanakan. Dari 22 (dua puluh dua) naskah yang telah berhasil didokumentasikan pada tahun 2005 ternyata terus meningkat menjadi 71 naskah, 8 judul film serta 7 judul buku yang telah diinventarisir. Kondisi ini memperlihatkan suatu kemajuan yang berarti dalam pelestarian sejarah.

Benda, situs, dan kawasan cagar budaya juga terus dilestarikan dengan mencari dan menyelidiki secara terus menerus benda-benda atau situs-situs atau kawasan-kawasan yang dapat dijadikan benda, situs, atau kawasan cagar budaya berikutnya. Kondisi ini sejalan dengan semakin meningkatnya organisasi pemerhati kebudayaan yang merupakan salah satu bentuk dari partisipasi masyarakat di bidang kebudayaan.

Sebagaimana telah disebutkan pada bagian terdahulu bahwa pencapaian sasaran di atas tidak terlepas dari berhasilnya pelaksanaan beberapa kegiatan yang menjadi pendukungnya yaitu antara lain:

1. Penulisan sejarah: dari Bandar Dagang menuju kota administrasi: kasus Pariaman
2. Sejarah Pemikiran Indonesia II
3. Perekaman Sejarah Melayu di Pulau Penyengat
4. Perekaman Sumber Tertulis dan Lisan di Aceh
5. Lawatan Sejarah Tingkat Nasional
6. Sosialisasi Pedoman Sejarah Lokal
7. Pengembangan Sistem Informasi Kesejarahan
8. Sosialisasi Penulisan Sejarah Indonesia di Palembang
9. Dialog interaktif kesejarahan
10. Workshop kesejarahan
11. Kemasan Informasi dan Publikasi BCB
12. Pembuatan DED Pelestarian Sangiran
13. Pengembangan Ruang Pameran Koleksi Situs Sangiran (2) Unit Ruang Pameran
14. Pembahasan Convention on the Means of the Prohibiting and Preventing The Illicit Import-Export and Transfer of Ownership of Cultural Property
15. Penetapan dan Registrasi BCB Secara Nasional di Kalsel, Gorontalo, NTT
16. Penanggulangan Kasus Pelestarian BCB

Secara umum keseluruhan pencapaian sasaran tersebut tidak mengalami hambatan atau kendala yang cukup berarti namun demikian masih terdapat beberapa hambatan kecil yang kemungkinan dapat menjadi penghambat besar di periode mendatang apabila tidak segera ditindaklanjuti. Hambatan-hambatan kecil tersebut antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini;
2. Lemahnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara antara lain karena kurangnya pemahaman nilai sejarah, termasuk pemahaman sejarah lokal;

3. Masih lemahnya kesadaran masyarakat terhadap upaya perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangan Bidang Sejarah dan Purbakala (sampai saat ini jumlah BCB/Situs yang terdaftar sebanyak 6.342 buah: yang sudah dipelihara  $\pm$  28%);
4. Belum terkelolanya museum sebagai sarana pendidikan/edukasi, pariwisata, dan sumber ilmu pengetahuan;
5. Belum adanya kriteria dan kewenangan yang jelas dalam pengelolaan aset budaya yang bersifat nasional dan regional antara Pemerintah Pusat, Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
6. Belum optimalnya pelaksanaan internalisasi nilai budaya bangsa melalui pendidikan budaya dan belum terwujudnya pembentukan karakter dan pekerti bangsa.
7. Masih minimnya dukungan dari berbagai pihak untuk mewujudkan berbagai program kegiatan yang mengarah kepada pencapaian sasaran kegiatan.
8. Belum dapat dipahaminya dengan baik program dan kegiatan oleh berbagai pihak yang terkait dengan pengembangan identitas budaya nasional.

Untuk dapat menindaklanjuti atau memberikan penyelesaian terhadap hambatan-hambatan tersebut kami merekomendasikan beberapa alternatif penyelesaian yaitu:

1. Perlunya percepatan penyelesaian revisi UU Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
2. Perlunya sosialisasi kepada masyarakat luas tentang nilai-nilai sejarah termasuk sejarah lokal, dengan adanya sosialisasi tentang nilai sejarah yang diharapkan timbul rasa patriotisme dan tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Salah satu upaya pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala perlu meningkatkan insentif (honor) Juru Pelihara guna meningkatkan kinerja dan motivasi para Juru Pelihara, mengingat banyaknya Benda Cagar Budaya/situs (6.342 buah) yang sangat memerlukan perawatan;
4. Perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk memperjelas pembagian kewenangan dalam pengelolaan aset budaya yang bersifat nasional dan regional.
5. Perlunya program dan kegiatan yang sifatnya berlaku nasional sehingga pengaruhnya dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.
6. Untuk meningkatkan kemampuan dan kemauan terhadap masyarakat yang memiliki kepedulian untuk mengembangkan kebudayaan, maka pemerintah selama beberapa tahun belakangan ini telah melaksanakan pemberian Anugerah Kebudayaan kepada masyarakat peduli tradisi, pengembang kebudayaan dan media massa serta penerbit yang berdedikasi terhadap kebudayaan.
7. Perlunya kesepakatan nasional dalam mewujudkan bagaimana menanamkan kegiatan-kegiatan yang bersifat memperkuat budaya nasional.
8. Pemerintah telah berupaya melalui pemberian bantuan kepada Taman Budaya diharapkan dapat mengembangkan kreatifitas seniman daerah.
9. Perlunya peningkatan perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang peduli kepada tradisi, pengembangan kebudayaan dan media massa yang berdedikasi terhadap kebudayaan.

Anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran ini dapat dilihat bahwa dari pagu anggaran sebesar Rp 93.742.714.000,00 digunakan sebesar Rp 75.335.768.260,00 atau sebesar 80,36 %. Dengan tingkat capaian *output* maupun *outcome* yang rata-rata 100% dapat dikatakan bahwa sudah terdapat efisiensi dalam penggunaan anggaran.

## **Sasaran 2:           Meningkatnya industri dan karya budaya yang mengacu pada budaya bangsa**

Pembangunan kebudayaan sangat penting diwaktu-waktu sekarang ini dengan derasnya arus informasi dari luar telah mendorong bangsa kita untuk lebih mengedepankan ketahanan budaya agar dapat bertahan dari terpaan globalisasi. Potensi adat dan budaya dari setiap suku bangsa yang semula mampu menjadi perekat persatuan menjadi makin memudar dengan adanya sistem standarisasi atau keseragaman yang diterapkan selama ini, sehingga kreatifitas tersumbat, penghargaan terhadap nilai dan karya budaya berkurang. Melihat kondisi tersebut pemerintah melalui Departemen Kebudayaan dan Pariwisata berusaha untuk menumbuh kembangkan industri dan karya budaya masyarakat melalui program dan kegiatan yang telah dicanangkan dalam rencana strategis tahun 2005 – 2009.

Untuk mengukur kinerja pencapaian sasaran tersebut telah dilakukan perumusan dan penetapan indikator kinerja berikut target dan realisasi yang akan dan telah dicapai dalam tahun 2007 sebagai berikut:

No.	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah produk dan karya budaya yang memiliki nilai ilmu pengetahuan, sosial budaya, dan ekonomi tinggi serta diakui ditingkat nasional dan internasional	7 skenario film, 10 performer, dan 5 lukisan	7 skenario film, 10 performer, dan 5 lukisan	100
2.	Jumlah penghargaan yang diberikan kepada masyarakat yang berjasa dalam perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan	4 kegiatan	4 kegiatan	100

Indikator kinerja utama yang telah ditetapkan ternyata sudah berhasil dalam pelaksanaannya misalnya karya budaya bangsa yang telah diakui oleh dunia internasional. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata juga telah memberikan penghargaan bagi masyarakat yang ikut serta dalam pelestarian ragam kebudayaan dalam beberapa kesempatan. Disadari bahwa pemberian penghargaan sangat diperlukan sebagai salah satu bentuk apresiasi yang dapat diberikan oleh departemen kepada masyarakat yang telah secara optimal melakukan upaya dalam pelestarian kebudayaan.

Apabila dilihat perbandingan dengan tahun 2005, ternyata hasil yang didapat pada tahun 2007 ternyata sebagian besar mengalami kenaikan yang cukup berarti. Kenaikan yang paling menonjol adalah adanya karya budaya bangsa yang diakui pada tingkat nasional dan internasional. Demikian pula dengan penghargaan yang telah diberikan kepada masyarakat semakin meningkat yang mengindikasikan bahwa semakin meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap peningkatan produk dan karya budaya Indonesia.

No.	Indikator	2005	2006	2007
1.	Jumlah produk dan karya budaya yang memiliki nilai ilmu pengetahuan, sosial budaya, dan ekonomi tinggi serta diakui ditingkat nasional dan internasional	1 skenario	6 skenario	7 skenario film, 10 performer, dan 5 lukisan
2.	Jumlah penghargaan yang diberikan kepada masyarakat yang berjasa dalam perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan	4 kegiatan	2 kegiatan	4 kegiatan

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2007 yang mendukung kepada keberhasilan pencapaian sasaran ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pemberian Penghargaan kepada Para Pelestari, Pengembang Tradisi, Media Massa dan Iklan Televisi

Pemberian Penghargaan kepada Para Pelestari, Pengembang Tradisi, Media Massa dan Iklan Televisi serta penulis buku anak yang bermuatan pendidikan budaya sebanyak 29 orang yang menunjukkan dedikasinya terhadap nusa dan bangsa sehingga perlu mendapat perhatian dari pemerintah dalam hal ini Departemen Kebudayaan dan pariwisata;

2. Gelar Budaya Dayak di Pontianak

Gelar Budaya Dayak yang dilaksanakan di Pontianak provinsi Kalimantan Barat (20 – 27 Mei 2007). Kegiatan ini merupakan sarana untuk mengembangkan seni dan budaya Dayak sehingga menjadi atraksi yang memikat dan dapat dinikmati oleh wisatawan Nusantara maupun Mancanegara. Kegiatan ini meliputi, pegelaran seni budaya dayak, pameran, upacara adat, dialog budaya, pawai, lomba olah raga, peragaan busana dan hiburan rakyat;

### 3. Pawai Budaya Nusantara



Dalam Dukungan kegiatan kesenian pada peringatan HUT-RI pada tanggal 17 Agustus 2007 di Jakarta, maka telah digelar kegiatan Pawai Budaya Nusantara dalam upaya meningkatkan rasa ketahanan, kesatuan dan persatuan bangsa. Selain itu juga dalam memberikan sarana promosi dan diplomasi seni budaya Indonesia. Penyelenggaraan gelar ini dengan melakukan prosesi dan arak-arakan yang melibatkan 2.500 seniman dari 28 provinsi;

### 4. Festival Internasional “Art Summit Indonesia” (ASI V/2007)

Festival Internasional ASI V/2007 berlangsung selama bulan November 2007, dari tanggal 1 s.d. 30 November 2007 yang menggelar karya-karya puncak seni kontemporer di beberapa tempat yaitu Graha Bhakti Budaya, Teater Luwes, Teater Studio, Goethe Institut, dan Gedung Kesenian Jakarta. Di samping pertunjukan, dilaksanakan juga seminar internasional selama dua hari, pada tanggal 2 – 3 November 2007 di Hotel Treva Internasional, dengan menghadirkan 8 narasumber dari 6 negara.

ASI telah ditetapkan ajang pertunjukan “gala-premier” nya. Th. 2007 ini telah mempergelarkan “World Premier”, seperti: Pappa Tarahumara dari Jepang, Folkwang Tanzstudio dari Jerman, Dieze-Diez Danza dari Spanyol, Arts Fussion dari Singapura; dan ada pula karya khusus “Asian-Premier” dari grup Dorky Park dari Jerman.

### 5. Pengiriman Film dan Delegasi pada Festival Film di luar negeri

Festival Film pada tingkat internasional merupakan ajang pertemuan para sineas dunia untuk mempromosikan peta perkembangan perfilman berbagai bangsa melalui berbagai aktivitas. Pada tahun 2007 pemerintah Indonesia telah memfasilitasi pengiriman film dan delegasi ke beberapa festival film di luar negeri seperti Festival Film Asia Pasifik, Festival Film Internasional Pusan di Korea Selatan dan Afrika Selatan serta Festival film Cannes di Perancis;

### 6. Peta Kebudayaan Indonesia

Peta Kebudayaan Indonesia adalah suatu peta yang melakukan inventarisasi terhadap karya budaya yang tak benda (*intangible*) yang tersebar di tanah air. Peta yang berwujud data base yang mengakses karya budaya berupa Upacara Adat, Kesenian (tarian dan musik), Makanan Tradisional (kuliner), Permainan Tradisional, Pakaian Adat dan tersaji dengan baik secara tertulis (deskripsi), audio dan visual menurut sifatnya. Untuk tahun 2007 telah dilakukan Training Of Trainer kepada pegawai-pegawai dari kabupaten di provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, NTB, NTT, dan Sumatera Barat sebanyak 22 orang. Dalam tahun ini juga telah dilakukan identifikasi dan perekaman budaya untuk ke lima wilayah provinsi tersebut.

### 7. Jembatan Budaya Indonesia – Malaysia

Malam Kesenian Jembatan Budaya Indonesia – Malaysia, adalah kunjungan balasan atas kedatangan Tim Kesenian Malaysia dalam Titian Muhibah Malaysia – Indonesia pada tahun 2006. Pementasan malam kesenian

Indonesia yang bertajuk “Jembatan Budaya” ini dirangkai dalam nuansa tradisi, yang dipetik dari taman keragaman budaya milik sendiri, Indonesia. Rangkaian yang ditampilkan dalam malam kesenian Indonesia ini berupa Tari Bedoyo dari Solo, Tari Zapin dari Riau, Tari Pakarena dari Makasar, Musik keroncong, Angklung yang dipentaskan secara interaktif dan grup musik Molucas dari Maluku. Selain dihadirkan juga dua orang penyembuh alternatif yang dapat membantu menyembuhkan berbagai penyakit serta Pameran kuliner Sumatera Barat. Seiring dengan penyelenggaraan Jembatan Budaya sebuah pameran seni rupa oleh Galeri Nasional Indonesia, bekerja sama dengan Malaysia National Art Galeri diadakan pula untuk menyemarakkan kegiatan ini.

Secara umum keseluruhan pencapaian sasaran tersebut tidak mengalami hambatan atau kendala yang cukup berarti namun demikian masih terdapat beberapa hambatan kecil yang kemungkinan dapat menjadi penghambat besar di periode mendatang apabila tidak segera ditindaklanjuti. Hambatan-hambatan kecil tersebut antara lain:

1. Penghematan dana sisa perjalanan dinas sesuai dengan Surat Menteri Keuangan RI Nomor: S. 348/MK.02/2007 tanggal 30 Juli 2007;
2. Terbatasnya jumlah dan kualitas SDM pada satker-satker di lingkungan Ditjen NBSF;
3. Penyesuaian (pengurangan) dana perjalanan dinas tidak mengikat sebesar 70% dari dana yang belum terserap sampai akhir Juli 2007 sangat mengganggu program kerja dan pencapaian target sasaran kinerja;
4. Belum adanya kejelasan mekanisme pengelolaan aset inventaris kekayaan negara di lingkungan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata;
5. Belum mantapnya pemahaman terhadap konsep pendudukan pada daerah menyebabkan dalam beberapa kegiatan pendudukan belum mengoptimalkan peran serta daerah;
6. Belum adanya aturan yang jelas tentang konsep bantuan sosial dalam penyusunan rencana dan program yang mengakibatkan diblokirnya dana bansos pada usulan anggaran DIPA tahun 2008;
7. Belum terimplementasikannya dengan baik ketentuan/peraturan mengenai pengembangan kebudayaan sehingga belum dapat dirasakan pengaruhnya bagi masyarakat;
8. Perlunya peran pemerintah untuk menumbuh kembangkan kebudayaan dan tradisi yang telah hidup subur sejak berabad-abad lamanya tidak punah;
9. Masih rendahnya intensitas koordinasi lintas departemen khususnya untuk mewujudkan sinergi kegiatan dan program antar departemen terkait;
10. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan budaya lokal.

Untuk dapat menindaklanjuti atau memberikan penyelesaian terhadap hambatan-hambatan tersebut kami merekomendasikan beberapa alternatif penyelesaian yaitu:

1. Perlunya sosialisasi yang terus-menerus terutama ada satu kegiatan yang sifatnya rutin melalui media-media informasi tertentu seperti melalui iklan layanan masyarakat;
2. Untuk meningkatkan kemampuan dan kemauan terhadap masyarakat yang memiliki kepedulian untuk mengembangkan kebudayaan, maka pemerintah selama beberapa tahun belakangan ini telah melaksanakan pemberian

Anugerah Kebudayaan kepada masyarakat peduli tradisi, pengembang kebudayaan dan media massa serta penerbit yang berdedikasi terhadap kebudayaan;

3. Pemerintah telah berupaya melalui pemberian bantuan kepada Museum Daerah dan Taman Budaya diharapkan kegiatan perawatan benda-benda purbakala, pameran yang dianggap sebagai sarana promosi kebudayaan serta usaha untuk melatih dan mengembangkan kreatifitas seniman tetap dapat dilaksanakan;
4. Pemerintah telah berusaha untuk mengakomodir kebutuhan penambahan pegawai pada satuan-satuan kerja (SATKER), dengan jalan mengangkat tenaga honorer, dan diharapkan adanya diklat-diklat teknis maupun administrasi untuk meningkatkan kemampuan SDM;
5. Meningkatkan koordinasi lintas departemen untuk mewujudkan kerjasama sinergi antar berbagai departemen. Tindak lanjut dengan merealisasikan program-program kegiatan sinergis dengan berbagai departemen pada tahun 2007 seperti dengan Depdiknas, Kantor Kemenegpora, Perpustakaan Nasional, Departemen Agama, serta memperluas program sinergi dengan departemen lainnya pada tahun 2008 seperti dengan Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, Depnakertrans, dan Kementerian Koperasi dan UKM;
6. Meningkatkan revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai budaya dan kearifan budaya lokal dan mensosialisasikannya kepada masyarakat melalui media massa cetak dan elektronik serta melalui penerbitan buku. Tindak lanjut dengan melaksanakan berbagai kegiatan pembudayaan dan pemasyarakatan festival budaya, pameran tradisional, pengungkapan nilai-nilai budaya, perekaman dan penayangan nilai-nilai budaya, penayangan iklan layanan masyarakat dan sebagainya.

Anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran ini dapat dilihat bahwa dari pagu anggaran sebesar Rp 50.010.334.000,00 digunakan sebesar Rp 45.356.160.822,00 atau sebesar 90,69%. Dengan tingkat capaian *output* maupun *outcome* sebagaimana telah disebutkan pada bagian terdahulu dapat dikatakan bahwa sudah terdapat cukup efisiensi dalam penggunaan anggaran.

]

### **Sasaran 3: Terwujudnya sikap saling menghargai dan menghormati di antara berbagai komunitas budaya bangsa dan perlindungan hukum individual dan komunal**

---

---

Pembangunan kebudayaan memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat ketahanan budaya dan keutuhan nasional tidak hanya dari ancaman konflik horizontal dan vertikal yang dapat mengarah kepada disintegrasi bangsa, tetapi juga membangun watak dan pekerti bangsa. Di sisi lain, peran strategis dari pembangunan kebudayaan adalah andilnya yang cukup besar untuk memperkuat ketahanan budaya antara lain mengembangkan dan melestarikan kebudayaan bangsa.

Dengan terwujudnya sikap saling menghargai dan menghormati diantara berbagai komunitas budaya diharapkan dapat memperkuat ikatan kebangsaan, hal ini dimaksudkan untuk menciptakan iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif dengan nilai-nilai kebangsaan. Untuk mengukur kinerja pencapaian sasaran tersebut telah dilakukan perumusan dan penetapan indikator kinerja berikut target dan realisasi yang akan dan telah dicapai dalam tahun 2007 sebagai berikut:

No.	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Menurunnya konflik etnis dan sosial yang disebabkan oleh budaya	44 kegiatan	44 kegiatan	100
2.	Meningkatnya jumlah kerjasama lintas budaya	3 kegiatan	3 kegiatan	100
3.	Kenaikan jumlah komunitas antar budaya	3 kegiatan	3 kegiatan	100
4.	Jumlah karya budaya bangsa yang mendapat perlindungan hukum	2 karya	2 karya	100

Salah satu hal yang perlu mendapat perhatian dalam pencapaian sasaran ini adalah adanya konflik yang terjadi di berbagai kelompok etnis dan strata sosial. Apabila konflik ini tidak segera diselesaikan atau dicarikan solusi penyelesaiannya maka akan menimbulkan perpecahan yang secara langsung maupun tidak langsung akan mengancam keutuhan bangsa. Dalam kerangka tersebut Departemen Kebudayaan dan pariwisata telah melakukan upaya-upaya untuk dapat memberikan solusi terhadap permasalahan konflik tersebut. Sebagai hasilnya dapat dilihat bahwa konflik yang terjadi selama tahun 2007 dapat diturunkan dengan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan.

Selain itu dalam rangka meningkatkan minat masyarakat dalam bidang kebudayaan serta menumbuhkan sikap saling menghormati perbedaan diantara sesama masyarakat, Departemen kebudayaan dan Pariwisata juga telah memberikan bantuan-bantuan kepada perorangan maupun lembaga yang bergerak dibidang kebudayaan. Dengan bantuan ini diharapkan kerjasama yang saling mendukung diantara unsur-unsur masyarakat dalam bidang kebudayaan dapat ditumbuhkembangkan.

Selain itu, dalam rangka untuk meningkatkan rasa aman terhadap karya budaya bangsa yang dihasilkan maka Departemen Kebudayaan dan Pariwisata telah melakukan upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hasil karya budaya bangsa. Dengan upaya tersebut diharapkan bahwa para seniman akan menghasilkan karya budaya tanpa adanya rasa takut bahwa karya mereka akan disalahgunakan.

Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka dapat dilihat bahwa terdapat kenaikan yang signifikan dalam kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menurunkan konflik etnis maupun sosial yang disebabkan oleh benda budaya. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



No.	Indikator	2005	2006	2007
1.	Menurunnya konflik etnis dan sosial yang disebabkan oleh budaya	15 kegiatan	40 kegiatan	44 kegiatan
2.	Meningkatnya jumlah kerjasama lintas budaya	9 kegiatan	8 kegiatan	3 kegiatan
3.	Kenaikan jumlah komunitas antar budaya	2 kegiatan	2 kegiatan	3 kegiatan
4.	Jumlah karya budaya bangsa yang mendapat perlindungan hukum	10 karya	9 karya	2 karya

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2007 yang mendukung kepada keberhasilan pencapaian sasaran ini antara lain sebagai berikut:

- **Penyusunan Naskah Akademik RUU Kebudayaan**

Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia, dan Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

Pengembangan kebudayaan nasional diarahkan untuk memberikan wawasan budaya dan makna dalam pembangunan nasional dalam segenap dimensi kehidupan kemasyarakatan, berbangsa, dan bernegara serta ditujukan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia Indonesia serta memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa.

Seiring dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 serta sasaran dan arah pengembangan kebudayaan nasional sebagaimana ditetapkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara diperlukan kebijaksanaan yang dapat dipergunakan sebagai landasan bagi upaya pemberdayaan kebudayaan bagi pembangunan dalam semua sektor.

Sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu mewujudkan peraturan perundangan-undangan yang bersifat memerintah, mengatur, melindungi, dan melestarikan kebudayaan yang merupakan payung hukum terhadap penyelenggaraan kebudayaan.

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang diharapkan dapat menjadikan:

1. Kebudayaan Nasional menuju ke arah kemajuan adab, budaya, dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing

yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan Indonesia sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945;

2. Kebudayaan Nasional diarahkan untuk memberikan wawasan budaya dan makna pada pembangunan nasional dalam segenap dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga meningkatkan harkat dan martabat manusia, jati diri dan kepribadian bangsa, mempertebal rasa harga diri dan kebanggaan nasional serta memperkuat jiwa persatuan dan kesatuan bangsa yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

- **Penetapan Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Pamong Budaya.**

Pegawai Negeri Sipil yang mengemban tugas, tanggung jawab, wewenang penuh untuk melaksanakan kegiatan pembinaan kebudayaan sebagian besar diemban oleh Pejabat Fungsional Pamong Budaya.

Pembinaan Kebudayaan merupakan seluruh proses kegiatan tugas Pamong Budaya untuk meningkatkan dan mengembangkan kebudayaan sebagai jati diri bangsa yang dilakukan secara terus menerus.

Namun sampai saat ini para pemangku Jabatan Fungsional Pamong Budaya masih belum mendapatkan haknya berupa tunjangan jabatan fungsional. Dalam rangka meningkatkan mutu pembinaan kebudayaan oleh Pamong Budaya serta untuk menjamin pembinaan karier, kepangkatan, jabatan dan peningkatan profesionalisme Pamong Budaya, Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film telah memprakarsai proses pengusulan besaran tunjangan jabatan fungsional, hingga disahkannya dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 74 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional, dengan tahapan proses sebagai berikut: penyiapan naskah penjelasan tentang tunjangan jabatan fungsional pamong budaya, pembahasan lintas departemen (BKN, Meneg PAN, dan Sekretariat Kabinet), koordinasi dengan unit-unit yang mengampu Jabatan Fungsional Pamong Budaya (Pusat, Dinas Provinsi, dan Kabupaten/Kota) untuk penghitungan jumlah para pemangku Pamong Budaya.

- **Revisi Undang-Undang Perfilman**

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata bekerjasama dengan masyarakat perfilman mengadakan Sosialisasi Rancangan Undang-undang perfilman untuk merevisi/mengganti Undang-Undang Nomor 8 tahun 1992 tentang Perfilman. Sosialisasi diadakan di berbagai kota seperti Bandung, Yogyakarta, Makasar dan Denpasar dalam upaya mendapatkan masukan atas rancangan yang telah dibuat oleh pemerintah.

- **Pembuatan Direktori Perfilman Indonesia**

Dalam rangka meningkatkan promosi Indonesia sebagai potensi pembuatan film Internasional maka pada tahun 2007, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata telah menerbitkan kembali buku promosi berjudul "The Indonesia Cinema Production Directory". Buku panduan tersebut didistribusikan ke seluruh dunia di berbagai festival dan pasar film Internasional seperti Cannes film Festival, Hongkong Film Festival, Pusan Internasional Film Festival. Sebagai upaya memperluas jaringan promosi dan peranserta perwakilan RI di luar negeri

buku panduan juga dikirimkan ke seluruh Perwakilan RI di luar negeri. Beberapa hasil telah diperoleh yaitu beberapa produser film mulai melirik untuk melakukan pembuatan film di Indonesia baik dari Asia , Eropa dan Australia.

- **Rapat Koordinasi Pelestarian Budaya Spiritual dan kepercayaan komunitas Adat**

Rapat Koordinasi Pelestarian Budaya Spiritual dan kepercayaan komunitas Adat, Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film, mempunyai tugas dan fungsi menangani kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha esa dan kepercayaan komunitas adat. Seiring dengan kebijakan pemerintah bahwa pemerintah sebagai pengendali dan fasilitator, maka dalam penanganan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan kepercayaan komunitas adat perlu dan penting untuk menentukan format atau model-model dalam rangka pelestarian dan pengembangannya. Di samping format atau model fasilitator, perlu diketahui juga bahwa SDM yang menangani kebudayaan secara umum, khususnya budaya spiritual dan sejak berlakunya otonomi daerah, kemudian latar belakang pendidikan yang menangani bidang kebudayaan dari berbagai disiplin ilmu. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam upaya melaksanakan tugas-tugas pelestarian dan pengembangan Budaya Spiritual, maka perlu adanya kesamaan pemahaman, pola pikir, arah gerak dan langkah antara semua pihak yang terkait.

Secara umum keseluruhan pencapaian sasaran tersebut tidak mengalami hambatan atau kendala yang cukup berarti namun demikian masih terdapat beberapa hambatan kecil yang kemungkinan dapat menjadi penghambat besar diperiode mendatang apabila tidak segera ditindaklanjuti. Hambatan-hambatan kecil tersebut antara lain:

1. Masih rendahnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang konservasi dan prevarasi Benda Cagar Budaya sehingga banyak peninggalan-peninggalan cagar budaya yang tidak terpelihara.
2. Minimnya tanggung jawab dari para juru pelihara sebagai akibat dari rendahnya insentif (upah) yang diterima sehingga banyak Benda Cagar Budaya yang kurang perawatan.
3. Terlambatnya penyelesaian revisi Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Caga Budaya sehingga mengakibatkan banyak Benda Cagar Budaya yang diselundupkan ke luar negeri.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk meyerahkan hasil temuan benda-benda purbakala kepada pemerintah.

Untuk dapat menindaklanjuti atau memberikan penyelesaian terhadap hambatan-hambatan tersebut kami merekomendasikan beberapa alternatif penyelesaian yaitu:

1. Sebagai usaha untuk meningkatkan kemampuan SDM maka Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala (Ditjen Sepur) telah melaksanakan beberapa kegiatan bimbingan dan pelatihan teknis bidang konservasi dan prevarasi.
2. Pemerintah perlu meningkatkan insentif (honor) juru pelihara guna meningkatkan motivasi para juru pelihara.
3. Perlunya pencepatan penyelesaian revisi Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 tetang Benda Cagar Budaya.

4. Perlunya sosialisasi kepada masyarakat luas untuk meningkatkan kesadaran agar melaporkan dan menyerahkan hasil temuan benda-benda cagar budaya.

Anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran ini dapat dilihat bahwa dari pagu anggaran sebesar Rp 49.154.995.000,00 digunakan sebesar Rp 42.501.056.550,00 atau sebesar 86,46%. Dengan tingkat capaian output maupun outcome yang rata-rata 100% dapat dikatakan bahwa sudah terdapat cukup efisiensi dalam penggunaan anggaran.

#### **Sasaran 4 :       Meningkatnya Pariwisata Nusantara**

Menata infrastruktur kepariwisataan, merupakan langkah yang ditempuh dalam rangka tercapainya target kunjungan wisatawan manca Negara maupun wisatawan nusantara. Selain itu agar terciptanya pengembangan destinasi di daerah-daerah telah dilakukan dukungan perinstisan pengembangan destinasi pariwisata pada beberapa daerah baru.

Untuk mengukur kinerja pencapaian sasaran tersebut telah dilakukan perumusan dan penetapan indikator kinerja berikut target dan realisasi yang akan dan telah dicapai dalam tahun 2007 sebagai berikut:

No.	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase pertumbuhan wisatawan manca negara per tahun	1,50 %	1,50 %	100
2.	Jumlah Wisatawan Mancanegara	6 juta	5.505.709	91,76
3.	Persentase pertumbuhan wisatawan nusantara per tahun	9,09 %	13,02 %	143,23
4.	Jumlah Wisatawan Nusantara (Wisman)	220 juta	116,11 juta	52,78
5.	Jumlah pengeluaran wisman/wisnus	79,85 triliun	79,85 triliun	100

Sebagai salah satu sektor unggulan maka pariwisata diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi pemasukan bagi negara. Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi persentase pertumbuhan wisatawan nusantara ternyata telah sesuai dengan target yang diharapkan yaitu sebesar 1,50%. Namun apabila dilihat dari jumlah absolut wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia ternyata masih lebih rendah dari yang direncanakan. Realisasi jumlah wisatawan yang datang berjumlah 5.505.709 orang dari target sebesar 6 juta orang atau 91,76 %.

Wisatawan nusantara merupakan salah satu obyek pariwisata yang perlu secara kontinyu ditumbuhkembangkan. Hal tersebut diperlukan karena dengan semakin meningkatnya aktivitas pariwisata pada suatu destinasi wisata maka

dapat diharapkan tingkat perekonomian pada daerah tersebut akan meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar. Pada tahun 2007 ini terdapat peningkatan dalam pertumbuhan wisatawan dari target sebesar 9.09% menjadi realisasi sebesar 13.02%. kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat perekonomian masyarakat Indonesia pada umumnya sudah mulai mengalami peningkatan.

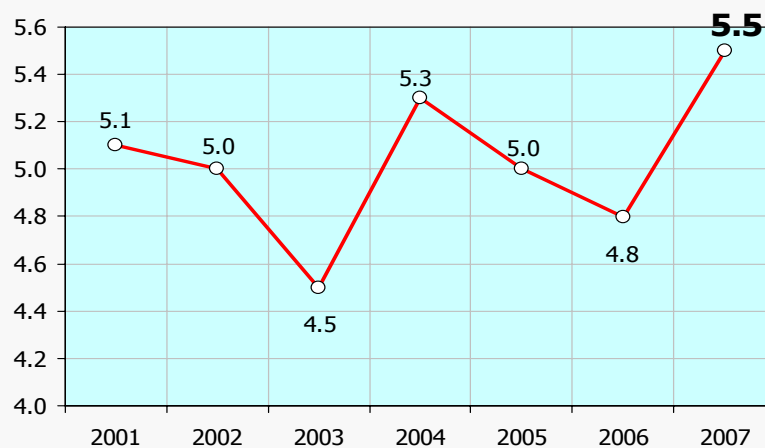
Bila dilihat dari tahun 2005, maka pada tahun 2007 ternyata terdapat peningkatan baik dalam jumlah wisatawan nusantara maupun jumlah pengeluaran yang dilakukan. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No.	Indikator	2005	2006	2007
1.	Persentase pertumbuhan wisatawan manca negara per tahun	1,21 %	1,50 %	1,50 %
2.	Jumlah Wisatawan Mancanegara	5,01 Juta	4,80 Juta	5.505.709
3.	Persentase pertumbuhan wisatawan nusantara per tahun	-6,00	-2,61	13,02 %
4.	Jumlah Wisatawan Nusantara (Wisman)	207 Juta	115 Juta	116,11 juta
5.	Jumlah Pengeluaran wisman/ Wisnus	86,60 trilliun	73,90 trilliun	79,85 trilliun

Berikut ini dapat dilihat beberapa tabel yang berisikan diagram mengenai kenaikan atau penurunan dalam jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara:

## HASIL YANG DICAPAI TAHUN 2007: WISMAN

DICAPAI JUMLAH KUNJUNGAN 5,5 JUTA KUNJUNGAN\*



Sumber: P2DSJ, 2007

Data Desember 2007 dan diluar 15 pintu utama di perkirakan atas dasar data tahun 2006

**Tabel 1**  
**Jumlah Wisman Melalui 15 Pintu Masuk**  
**Januari-Desember 2006 dan 2007**

Pintu Masuk	November 2007 (orang)	Desember 2007 (orang)	Jan-Des 2006 (orang)	Jan-Des 2007 (orang)	Perubahan Des thd Nov 2007 (%)	Perubahan Jan-Des 2007 thd 2006 (%)	Peran thd Total Jan-Des 2007 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Total 15 Pintu	399 609	431 001	4 006 525	4 541 458	7,86	13,35	100,00
1. Soekarno-Hatta	110 234	104 874	1 147 250	1 153 006	-4,86	0,50	25,39
2. Ngurah Rai	148 386	154 247	1 328 929	1 741 935	3,95	31,08	38,36
3. Polonia	11 192	11 162	110 405	116 614	-0,27	5,62	2,57
4. Batam	91 494	116 787	1 012 711	1 077 306	27,64	6,38	23,72
5. Manado	1 785	1 580	17 745	19 274	-11,48	8,62	0,42
6. Juanda	11 869	11 824	83 439	140 438	-0,38	68,31	3,09
7. Entikong	1 744	1 996	14 540	18 220	14,45	25,31	0,40
8. Adi Sumarmo	1 806	2 491	13 834	18 628	37,93	34,65	0,41
9. Minangkabau	2 311	3 308	24 910	26 974	43,14	8,29	0,59
10. Mataram	997	1 560	26 069	13 981	56,47	-46,37	0,31
11. Makassar	383	246	1 202	3 502	-35,77	191,35	0,08
12. Sepinggan	802	753	9 563	9 329	-6,11	-2,45	0,21
13. Sultan S. Kasim II	1 356	1 612	19 480	16 942	18,88	-13,03	0,37
14. Tanjung Priok	6 028	5 751	66 679	65 735	-4,60	-1,42	1,45
15. Tanjung Pinang	9 222	12 810	129 769	119 574	38,91	-7,86	2,63



## EVALUASI TAHUN 2007

### HASIL YANG DICAPAI TAHUN 2007: WISMAN

DICAPAI DEvisa USD 5,3 MILIAR



Sumber: P2DSJ, 2007. BI, 2006  
Data 2007 atas dasar perkiraan kumulatif kunjungan, lama tinggal dan pembelanjaan

## JUMLAH KUNJUNGAN WISMAN KE INDONESIA DI TIAP PROPINSI (Data LANGSUNG)

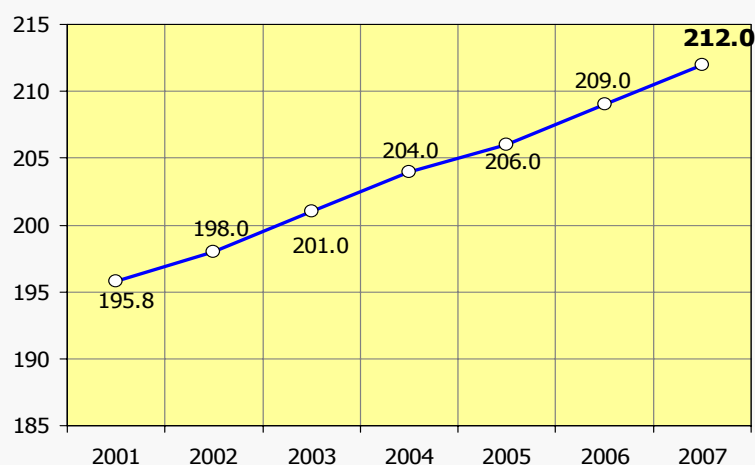
NO	PROPINSI	2004	2005	2006
1	SUMATERA UTARA	126,815	138,177	135,017
2	SUMATERA BARAT	15,385	21,053	28,174
3	RIAU	41,116	74,553	85,272
4	KEPULAUAN RIAU	2,224,516	1,652,394	1,639,933
5	DKI JAKARTA	1,065,460	1,169,608	1,216,307
6	JAWA BARAT	2,323	18,495	23,341
7	BANTEN	18,779	18,266	20,189
8	JAWA TENGAH	17,206	24,170	35,430
9	YOGYAKARTA	-	6,449	3,032
10	JAWA TIMUR	112,914	116,410	109,283
11	BALI	1,528,727	1,460,053	1,336,250
12	NUSA TENGGARA BARAT	26,132	33,057	27,836
13	NUSA TENGGARA TIMUR	1,442	7,429	12,052
14	KALIMANTAN TIMUR	28,628	37,057	21,450
15	SULAWESI UTARA	46,046	143,655	92,081
16	SULAWESI SELATAN	20,837	22,825	21,687
JUMLAH		4,669	5,692	3,268



## EVALUASI TAHUN 2007

### HASIL YANG DICAPAI TAHUN 2007: WISNUS

DICAPAI JUMLAH 212 JUTA PERGERAKAN

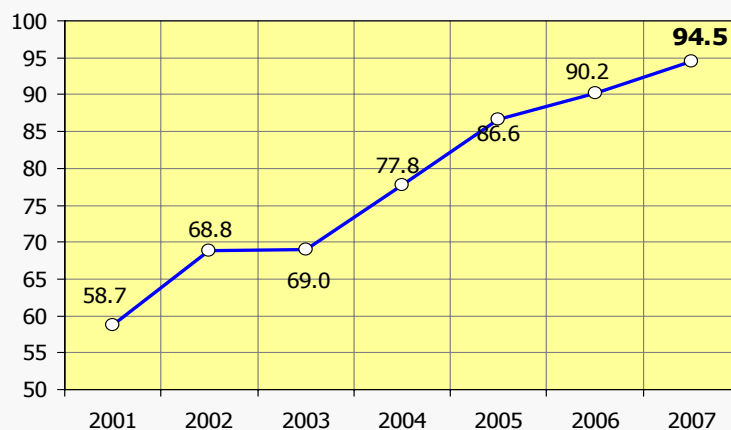


Sumber: P2DSJ, 2007



## HASIL YANG DICAPAI TAHUN 2007: WISNUS

DICAPAI BELANJA SEBESAR **RP 94,5 TRILIUN**



Sumber: P2DSJ, 2007

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk pencapaian sasaran ini adalah:

- Kegiatan Pengembangan Pasar
- Kegiatan Promosi Dalam Negeri
- Kegiatan Promosi Luar Negeri
- Kegiatan Sarana Promosi
- Kegiatan Promosi Konvensi, Insentif dan Pameran
- Kegiatan Optimalisasi dan Pendukung Pengembangan



Antusiasme masyarakat menyambut pencanangan Tahun Kunjungan Indonesia 2008, pada acara soft Launching VIY 2008, yang antara lain menampilkan AB3 pada tanggal 30 November 2008, di Gedung Balai Kartini, Jakarta.



*Menteri Kebudayaan dan Pariwisata sedang memberikan sambutan pada pembukaan stand Indonesia pada ITB Berlin, Jerman.*

Secara umum keseluruhan pencapaian sasaran tersebut tidak mengalami hambatan atau kendala yang cukup berarti namun demikian masih terdapat beberapa hambatan kecil yang kemungkinan dapat menjadi penghambat besar diperiode mendatang apabila tidak segera ditinndaklanjuti. Hambatan-hambatan kecil tersebut antara lain:

1. Adanya berbagai persoalan antara lain adanya berbagai bencana di bebarapa daerah di Indonesia yang tidak bisa diprediksi sebelumnya;
2. Permintaan dana dukungan akselerasi tidak terpenuhi, sehingga beberapa program yang sudah disusun tidak terealisasi;
3. Adanya larangan terbang oleh Uni Eropa bagi pesawat-pesawat Indonesia;
4. Terbatasnya penerbangan langsung ke pasar utama sehingga keberhasilan yang dicapai belum maksimal. Pengembangan pariwisata nusantara belum dikelola secara optimal dan dijadikan prioritas;
5. Koordinasi antar daerah dalam pengembangan pariwisata nusantara melalui perjalanan wisnus antar propinsi masih kurang.

Untuk dapat menindaklanjuti atau memberikan penyelesaian terhadap hambatan-hambatan tersebut kami merekomendasikan beberapa alternatif penyelesaian yaitu:

1. Langkah-langkah yang perlu diambil untuk pemecahan masalah tersebut di atas adalah untuk tahun 2008 dicanangkan program Visit Indonesia Year 2008 untuk memacu pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia, peningkatan anggaran promosi, dan, peningkatan koordinasi dan peran serta *stakeholders*;
2. Dalam tahun mendatang akan dipersiapkan penerapan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang andal termasuk penetapan indikator kinerja outcome sudah dapat dilaksanakan, sehingga Direktorat Jenderal Pemasaran dapat memperlihatkan manfaat program dan kegiatannya bagi masyarakat. Pariwisata nusantara (domestik) harus semakin ditingkatkan, disamping manfaat langsung, kegairahan pariwisata nusantara juga akan mampu mengembangkan citra bahwa perjalanan wisata di Indonesia aman, tidak ada masalah, ini akan mendorong kepercayaan orang asing;

3. Perlunya kerjasama dan koordinasi yang lebih baik untuk membuka peluang pengembangan perjalanan wisata nusantara dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran ini dapat dilihat bahwa dari pagu anggaran sebesar Rp 163.807.165.000,00 digunakan sebesar Rp 146.708.111.887,00 atau sebesar 89,56%. Dengan tingkat capaian *output* maupun *outcome* yang rata-rata 100% dapat dikatakan bahwa sudah terdapat cukup efisiensi dalam penggunaan anggaran.

### **Sasaran 5:            Meningkatnya   kontribusi   pariwisata   dalam   perekonomian**

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan perolehan devisa negara adalah melalui sektor pariwisata dimana sektor tersebut sangat potensial untuk dikembangkan mengingat letak geografis yang sangat strategis Indonesia dan heterogen baik dari segi budaya, adat istiadat, serta obyek-obyek wisata sebagai andalan pemerintah dalam rangka memulihkan kondisi krisis serta dalam upaya meningkatkan kontribusi pariwisata dalam perekonomian nasional.

Untuk itu pembangunan kepariwisataan nasional diarahkan untuk meningkatkan devisa, dengan kebijakan pembangunan kepariwisataan, peningkatan efektifitas pemasaran melalui kegiatan promosi dan pengembangan produk-produk wisata yang mampu memenuhi sinergi dalam jasa pelayanan pariwisata. Untuk mengukur kinerja pencapaian sasaran tersebut telah dilakukan perumusan dan penetapan indikator kinerja berikut target dan realisasi yang akan dan telah dicapai dalam tahun 2007 sebagai berikut:

No.	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Kenaikan jumlah devisa dari wisman	6 miliar US\$	5,3 miliar US\$	88,33
2.	Persentase peningkatan kontribusi pariwisata dalam perekonomian nasional	6 %	5,9 %	98,33

Capaian kinerja pada sasaran ini yang direpresentasikan melalui indikator-indikator devisa dan kontribusi pariwisata ternyata belum sesuai dengan yang diharapkan dimana capaian indikator-indikator tersebut hanya mencapai 88,33% dan 98,33%. Walaupun masih termasuk kategori baik namun indikator-indikator tersebut perlu mendapatkan perhatian pada tahun-tahun mendatang karena wisatawan mancanegara merupakan salah satu penghasil devisa bagi negara Indonesia.

Yang perlu diperhatikan dan dilakukan pada tahun-tahun mendatang adalah perlunya ditingkatkan promosi serta kunjungan duta-duta wisata keluar negeri terutama ke negara-negara yang memiliki kepentingan dengan Indonesia dalam bidang pariwisata. sebelum hal tersebut dapat dilakukan, maka diperlukan suatu pemetaan yang lebih komprehensif mengenai profil negara serta penduduk yang memiliki minat dan keinginan untuk melakukan wisata ke Indonesia namun belum memiliki cukup informasi mengenai lokasi-lokasi wisata di Indonesia.

Tahun 2007 merupakan tahun yang menguntungkan dimana terlihat bahwa jumlah devisa yang dihasilkan pada tahun 2007 mengalami peningkatan dari 4.526 miliar US\$ pada tahun 2005 menjadi 5,3 miliar US\$. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No.	Indikator	2005	2006	2007
1.	Kenaikan jumlah devisa dari wisman	4.526 miliar US\$	4.871 miliar US\$	5,3 miliar US\$
2.	Persentase peningkatan kontribusi pariwisata dalam perekonomian nasional	4 %	5 %	5,9 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah devisa dari wisman dengan peningkatan kontribusi pariwisata dalam perekonomian nasional. Kenaikan jumlah devisa dari wisman akan memberikan kontribusi yang lebih tinggi kepada perekonomian nasional.

Pencapaian sasaran tersebut mengalami sedikit hambatan atau kendala antara lain:

- Penentuan personil yang akan berangkat untuk mengikuti event promosi di luar negeri yang memakan waktu lebih lama. Karena adanya perubahan tersebut menyebabkan kekurangsiapan dalam mengirimkan staf yang akan mengikuti event tersebut, sehingga optimalisasi pencapaian sasaran belum bisa tercapai.
- Koordinasi dengan pihak industri dalam mengadakan promosi keluar negeri belum dapat ditindaklanjuti dengan baik karena respon dari pihak industri terutama dalam hal informasi berapa transaksi yang telah diperoleh selama mengikuti event pariwisata diluar negeri tidak pernah tercatat. Pihak industri enggan untuk mengutarakannya kepada pemerintah sehingga evaluasi keberhasilan masih sulit diperoleh.
- Dalam mengikuti pameran pariwisata di luar negeri daerah belum memiliki visi dan misi yang jelas sehingga keikutsertaannya menjadi tidak efektif.
- Kegiatan promosi pariwisata belum dilaksanakan secara terfokus terhadap pasar-pasar utama atau pasar-pasar yang kontribusinya besar terhadap jumlah kedatangan wisman ke Indonesia (seperti Malaysia, Singapore, Jepang, Korea, Australia, Taiwan, Inggris, Jerman, Rusia dan Swiss).

Untuk dapat menindaklanjuti atau memberikan penyelesaian terhadap hambatan-hambatan tersebut kami merekomendasikan beberapa alternatif penyelesaian yaitu:

- a. Untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi maka jauh-jauh hari sebelum keberangkatan keluar negeri untuk mengikuti pameran perlu dilakukan perencanaan mengenai tim yang akan berangkat.
- b. Perlu adanya pemilihan dan pemilahan kegiatan yang diikuti misalnya untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat “*consumer fair*” akan lebih efektif untuk melakukan “*promotion image*” dengan pemerintah sebagai “*leader*”
- c. Untuk menunjang kegiatan promosi pariwisata diluar negeri sebaiknya kegiatan Kantor Pusat Promosi Pariwisata di luar negeri diaktifkan kembali.
- d. Perlu ditingkatkan brosur-brosur yang berkualitas baik, dengan penempatan yang baik di bandara-bandara maupun stasiun-stasiun kereta api.

## Sasaran 6:      Meningkatnya produk dan pelayanan pariwisata yang memiliki keunggulan kompetitif

Pengembangan kepariwisataan Nasional memiliki dimensi ekonomi, sosial budaya, politik, pertahanan dan keamanan nasional, sangat disadari bahwa tujuan pembangunan kepariwisataan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya dalam rangka perekonomian nasional. Secara spesifik pengembangan kepariwisataan diharapkan dapat memperbesar penerimaan devisa, memperluas pemerataan dan kesempatan kerja serta mendorong pembangunan daerah.

Pada dasarnya, kepariwisataan memiliki peranan yang luas terutama dalam rangka peningkatan ekspor nasional yang saat ini menghadapi persaingan yang ketat di pasar dunia. Oleh karena itu kepariwisataan dapat memacu potensi penerimaan devisa terutama dari kegiatan dan kunjungan wisatawan mancanegara. Untuk mengukur kinerja pencapaian sasaran tersebut telah dilakukan perumusan dan penetapan indikator kinerja berikut target dan realisasi yang akan dan telah dicapai dalam tahun 2007 sebagai berikut:

No.	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Kenaikan peringkat Indeks Pelayanan Pariwisata	0 %	0 %	0
2.	Turunnya kasus eksploitasi anak dan seks komersial di lingkungan pariwisata	0 %	0 %	0
3.	Pertambahan jenis pelayanan di pintu masuk	15 pintu masuk	10 pintu masuk	66,67
4.	Jumlah peningkatan aksesibilitas dan fasilitas di setiap destinasi	10 kali	10 kali	100
5.	Jumlah produk dan pelayanan pariwisata yang menerapkan kode etik pariwisata dunia	5 paket	5 paket	100



No.	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
6.	Kenaikan jumlah even pariwisata yang berpola kemitraan	4 %	4 %	100
7.	Persentase meningkatnya jumlah organisasi/perorangan yang berusaha dibidang pariwisata	1 %	1 %	100

Dengan tingkat capaian yang seluruhnya sebesar 100% dapat dikatakan bahwa capaian kinerja pada sasaran ini sudah berhasil dengan baik. Beberapa indikator cukup penting bagi sasaran ini adalah berhasilnya koordinasi pada beberapa instansi untuk meningkatkan pelayanan pada pintu-pintu masuk bagi wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan manca negara. Keberhasilan tersebut juga dimbangi dengan meningkatnya aksesibilitas dan fasilitas disetiap destinasi wisata yang ada sekaligus peningkatan keamanan dan keselamatan bagi para wisatawan. Selain itu, perlu pula dicatat bahwa terjadi peningkatan pelayanan yang berkelas dunia pada setiap destinasi dimana hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja *outcome* yang sudah sesuai dengan target yang direncanakan.

Keberhasilan capaian kinerja pada sasaran ini tidak terlepas dari adanya koordinasi yang cukup baik pada seluruh pintu-pintu masuk pariwisata Indonesia antara departemen kebudayaan dan pariwisata dengan instansi-instansi pemerintah terkait. Hal ini terlihat dengan peningkatan koordinasi instansi terkait untuk aksesabilitas dan fasilitasi pada pintu-pintu masuk. Koordinasi dan kerjasama ini sangat diperlukan apalagi dengan adanya visa pada saat kedatangan (*Visa On Arrival*), tanpa adanya kedua hal tersebut maka penerapan visa saat kedatangan ini akan cukup merepotkan bagi wisatawan.

Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2005 maka pada beberapa indikator yaitu: koordinasi pelayanan pada pintu masuk dan peningkatan keselamatan dan keamanan serta peningkatan pelayanan yang berkelas dunia mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No.	Indikator	2005	2006	2007
1.	Kenaikan peringkat Indeks Pelayanan Pariwisata	0 %	0 %	0 %
2.	Turunnya kasus eksploitasi anak dan seks komersial di lingkungan pariwisata	0 %	0 %	0 %
3.	Pertambahan jenis pelayanan di pintu masuk	3 pintu masuk	9 pintu masuk	10 pintu masuk
4.	Jumlah peningkatan aksesibilitas dan fasilitas di setiap destinasi	13 kali	13 kali	10 kali
5.	Jumlah produk dan pelayanan pariwisata yang menerapkan kode	15 paket	4 paket	5 paket

No.	Indikator	2005	2006	2007
	etik pariwisata dunia			
6.	Kenaikan jumlah even pariwisata yang berpola kemitraan	2 %	4 %	4 %
7.	Persentase meningkatnya jumlah organisasi/perorangan yang berusaha dibidang pariwisata	1 %	0 %	1 %

Beberapa kegiatan yang terkait dengan pencapaian sasaran ini antara lain sebagai berikut:

- **Workshop Pencegahan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (PESKA)**

Kegiatan Workshop Pencegahan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (PESKA) dilingkungan anak-anak dilaksanakan oleh Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata c.q. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat pada tanggal 19 Juni 2007, bertempat di Hotel Santika Bandung. Acara ini di buka oleh Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata, Ir. Sambudjo Parikesit.

Peserta workshop berjumlah 67 orang yang terdiri dari asosiasi pariwisata, frontliner, LSM, Akademisi instansi terkait (Dinas Sosial, Dinas Kesra) serta narasumber dari Ditjen PDP, Ecpat Indonesia, Ahli Komunikasi dan Ahli Antropologi dari UNPAD Bandung.

Tujuan dilaksanakan workshop PESKA adalah untuk mengkampanyekan dan mengkomunikasikan kebijakan pemerintah serta memotivasi masyarakat dalam upaya pencegahan Eksploitasi Seksual Komersial Anak dan meningkatkan kesadaran baik di tingkat pemerintah, instansi terkait, industri pariwisata dan proaktif dalam upaya pencegahan Eksploitasi Seksual Komersial Anak di destinasi pariwisata.

Undang-Undang No. 23 tahun 2002 mengenai perlindungan anak dengan tegas menyatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

- **Sosialisasi dan Rencana Aksi Sadar Wisata di Sulawesi Selatan**

Pada tanggal 7 Agustus 2007 bertempat di Hotel Quality Makassar telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Sadar Wisata. Acara yang dihadiri oleh 50 mahasiswa dari berbagai kampus seperti Universitas Hasanuddin, Universitas Negeri Makassar, Universitas Muslimin Makassar, Universitas 45 Makassar dan Akademi Pariwisata Makassar. Pada acara ini Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata, Ir. Sambudjo Parikesit menyampaikan beberapa kebijakan penting Program Sosialisasi Sadar Wisata yang terkait Pengembangan Destinasi Wisata Unggulan. Beliau menyatakan juga tentang betapa pentingnya membangun dan mengembangkan suatu Destinasi dengan memperhatikan potensi kelokalan dan kekhasan atraksi di daerah, kelancaran aksesibilitas dan pemberdayaan masyarakat di Destinasi Unggulan.

Pada acara ini juga dilaksanakan diskusi panel dengan Narasumber dari Jakarta yaitu DR. Acep Hidayat, Ph.D. Yang membawakan topik “Pengertian dan Manfaat Pengembangan Pariwisata Nasional” dengan inti pembahasan tentang peran dan kontribusi pariwisata dalam pembangunan Nasional seperti meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka kesempatan kerja dan pemerataan pembangunan daerah serta memperkuat budaya dan jati diri bangsa. Selain itu diadakan juga diskusi panel dengan Narasumber Prof. DR. H. Abu Hamid, Rektor Universitas 45 Makassar dan Drs. Syahlan Sulthon, M.Si. Kadisbudpar Provinsi Sulawesi Selatan.

- **Workshop Peningkatan Daya Saing Produk Seni Kerajinan Dalam Mendukung Upaya Pemberdayaan Masyarakat**

Kegiatan ini dilaksanakan pada 18 – 19 Juli 2007 di Bogor yang bertempat Hotel Yasmin Bogor, acara ini dibuka secara resmi oleh Dirjen Pengembangan Destinasi Pariwisata. Workshop ini juga turut diisi oleh paparan dari Bapak Firmansyah, Ph.D. tentang Strategi Pemasaran Produk Cenderamata Indonesia di Pasar Global, Direktur Pemberdayaan Masyarakat Ditjen PDP, Ukus Kuswara, M.M. tentang Pemberdayaan Masyarakat Perajin dalam Upaya Mendukung Meningkatkan Daya Tarik Wisata, Budi Virgono tentang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Budaya dalam rangka meningkatkan kualitas produk kerajinan yang ramah lingkungan, Asmoro Darmas tentang Pemanfaatan Potensi Kearifan Lokal dalam berbagai kegiatan produksi kerajinan sebagai cenderamata dan Priyo Pratomo tentang Pemanfaatan Program *Seal Of Excellence (SoE)* dalam produk kerajinan Indonesia.

Workshop diikuti oleh kurang lebih 65 Orang yang terdiri dari perwakilan Instansi Pemerintah (Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata serta Kementerian Negara Koperasi dan UMKM), Lembaga Pembina Kesenian di Indonesia (Desain Kerajinan Nasional, Asosiasi Ekspor dan Pengusaha Handicraft Indonesia, Pusat Desain Indonesia, Himpunan Mutumanikam Nusantara, Yayasan Batik Indonesia) dan Perwakilan dari Perguruan Tinggi (Universitas Trisakti, Universitas Tarumanegara dan Institut Kesenian Jakarta).

- **TOT Sadar Wisata Bagi Pejabat di Kalimantan Tengah**

Kegiatan yang berlangsung pada 21 – 23 Agustus 2007 ini dibuka oleh Direktur Pemberdayaan Masyarakat, Ukus Kuswara, MM dengan peserta para pejabat di lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini maka program Sadar Wisata akan lebih cepat tersosialisasikan sampai ke masyarakat banyak. Oleh karena sebagai birokrat di instansi terkait, Sadar Wisata dapat tersebar dan terimplementasi bagi kalangan instansi sendiri dan juga masyarakat luas.

- **Sosialisasi Sadar Wisata Bagi Mahasiswa Sumatera Barat**

Kegiatan ini dilaksanakan di Padang pada tanggal 11 Agustus 2007 di Hotel Bumi Minang. Acara yang dibuka oleh Dirjen Pengembangan Destinasi Pariwisata, Sambudjo Parikesit ini bertujuan untuk menanamkan budaya sadar wisata kepada para mahasiswa sebagai calon-calon pemimpin di masa datang. Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini maka mahasiswa bisa bertindak sebagai *agent of change* di lingkungannya dalam menggalakkan sadar wisata. Acara ini dimulai oleh sambutan dari Kadisparsenud Provinsi Sumbar, James



Heliward. Setelah itu dilakukan penyematan jaket Sadar Wisata secara simbolis kepada mahasiswa.

- **Pencanangan Gerakan Sadar Wisata**

Bertempat di Lapangan Gasibu, di depan Gedung Sate Bandung tanggal 25 November 2007 Menteri Kebudayaan dan Pariwisata menggelorakan kembali Kampanye Sadar Wisata dengan mengikutsertakan dan mengajak seluruh lapisan masyarakat. Dalam Kampanye Sadar Wisata tersebut dibacakan Deklarasi Nasional Peningkatan Sadar Wisata oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu daerah yang mempunyai perhatian yang sangat tinggi terhadap kepariwisataan, di antara 7 (tujuh) Gubernur yang hadir yaitu: Sumatera Barat, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Gorontalo, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Selanjutnya sebagai tanda dicanangkannya Kampanye Sadar Wisata dan sebagai respons kongkrit Indonesia terhadap ancaman perubahan iklim global yang disebabkan kurangnya hutan penyerap emisi gas beracun, maka pada kesempatan pencanangan Kampanye Sadar Wisata tersebut Menteri Kebudayaan dan Pariwisata didampingi Gubernur Sumatera Barat, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Gorontalo, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah menanam pohon "Karet Merah" dari Provinsi Jambi sebagai tanda penjabaran dari salah satu unsur Sapta Pesona yaitu Sejuk.

- **Workshop Pembentukan Polisi Pariwisata**

Workshop ini diselenggarakan selama 1 (satu) hari pada hari Sabtu, tanggal 24 November 2007 mulai pukul 10.00 - 16.00 WIB di Grand Ball Room Hotel Savoy Homann Bandung. Pembicara yang diundang adalah I Gede Ardika yang menyampaikan presentasi dengan tema "Sadar Wisata sebagai Faktor Strategis bagi pencapaian Visi Pembangunan Pariwisata"; H.I Budyana (Kadinas Budpar Provinsi Jabar) yang menyampaikan tema "Mengembangkan Sapta Pesona sebagai Kearifan Budaya Masyarakat". Prof. James P. Spillane yang menyampaikan tema "Keamanan dan Ketertiban sebagai Salah Satu Faktor Kunci Pengembangan Pariwisata yang Berdaya Saing"; Wuyastuti Sunaryo yang menyampaikan tema "Prinsip-Prinsip Operasional Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban di Bidang Pariwisata"; Kepala Babinkam POLRI yang menyampaikan tema "Pelaksanaan Tugas Operasional Polri dalam mendukung penyelenggaraan Kepariwisata".

Acara ini dibuka oleh Dirjen Pengembangan Destinasi Pariwisata, Ir. Sambudjo Parikesit dan dihadiri oleh instansi terkait, Dinas Budpar se-Indonesia, 13 Polda (DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTT, NTB, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan), Asosiasi Pariwisata Indonesia, Hotel, Biro Perjalanan Wisata, Sekolah Pariwisata, Penerbangan dan Lembaga Penelitian, serta Direktorat Pemberdayaan Masyarakat, Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata Depbudpar sebagai penyelenggara.

- **Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual dan Komersial terhadap Anak (RAN PESKA) di lingkungan Pariwisata**

Acara ini dibuka oleh Dirjen Pengembangan Destinasi Pariwisata, Ir. Sambudjo Parikesit. Dalam pidato pembukaan Workshop Kampanye Pencegahan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (PESKA) di Lingkungan

Pariwisata beliau menyebutkan tugas melindungi dan membimbing anak-anak melekat pada kita semua tidak terkecuali pelaku sektor pariwisata. Tanggung jawab tersebut melekat tidak saja pada orang tua anak, tetapi juga pada masyarakat dan industri pariwisata, disamping pada pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah.

Workshop ini bertempat di Hotel Makassar Golden, pada hari Kamis, 1 November 2007. Adapun para peserta yang datang antara lain yaitu dari ASITA, PHRI, HPI, Travel Agent, Polisi Pariwisata, para pelaku industri pariwisata seperti pengusaha pub, panti pijat, warnet, salon, spa, restoran, hotel. Selain para tamu undangan diatas workshop ini juga dihadiri oleh para mahasiswa di Makasar. Dengan para pembicara dari Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Drs. Ukus Kuswara M.M., Sekretaris LPA Sulawesi Selatan, M. Ghufan H. Kordi K. dan Kompal Familah.

- **Rencana aksi pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata**

Guna mengidentifikasi isu dan permasalahan strategis yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata serta menyiapkan arahan strategis upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata, direktorat pemberdayaan masyarakat telah melakukan kegiatan penyusunan rencana aksi pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Adapun sasarannya adalah tersusunnya profil potensi dan kondisi masyarakat dalam pengembangan pariwisata, serta arahan kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata, sedangkan keluarannya adalah :

- Konsep pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata
- Rencana aksi pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata (strategi, pokok program dan kegiatan)
- Strategi implementasi program aksi pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata (prioritas/pentahapan, koordinasi sektoral – regional/*stakeholder*)

Secara umum keseluruhan pencapaian sasaran tersebut tidak mengalami hambatan atau kendala yang cukup berarti namun demikian masih terdapat beberapa hambatan kecil yang kemungkinan dapat menjadi penghambat besar diperiode mendatang apabila tidak segera ditindaklanjuti. Hambatan-hambatan kecil tersebut antara lain:

- a. Produk dan citra pariwisata Indonesia walaupun banyak dan beragam akan tetapi belum dapat berkompetisi dengan destinasi-destinasi lain di tingkat regional.
- b. Koordinasi antar instansi terkait baik pusat maupun daerah dengan pengembangan destinasi pariwisata masih belum dapat diwujudkan sehingga menjadi kendala dalam pengembangan pariwisata di daerah.
- c. Dukungan dari instansi terkait masih minim sehingga program-program yang direncanakan oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata belum dapat dijalankan secara optimal. Koordinasi antar instansi terkait dalam pengembangan kebudayaan dan pariwisata masih belum dapat diwujudkan sehingga menjadi kendala dalam pengembangan pariwisata di daerah.

- d. Sering terjadi perubahan kegiatan yang dituangkan dalam revisi DIPA maupun POK sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan.

Untuk dapat menindaklanjuti atau memberikan penyelesaian terhadap hambatan-hambatan tersebut kami merekomendasikan beberapa alternatif penyelesaian yaitu:

- a. Perlu peningkatan kualitas produk pariwisata Indonesia agar bisa bersaing ditingkat regional.
- b. Perlunya peningkatan koordinasi antara berbagai sektor yang terkait dengan pengembangan pariwisata di daerah.
- c. Perlunya perencanaan yang matang dalam menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun-tahun mendatang.

Anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran ini dapat dilihat bahwa dari pagu anggaran sebesar Rp 80.215.400.000,00 hanya digunakan sebesar Rp 68.395.768.269,00 atau hanya sebesar 85,27%. Dengan tingkat capaian output maupun outcome yang rata-rata 100% dapat dikatakan bahwa sudah terdapat efisiensi dalam penggunaan anggaran.

## **Sasaran 7:      Meningkatnya pemerataan dan keseimbangan pengembangan destinasi pariwisata yang sesuai dengan potensi masing-masing daerah**

---

Sehubungan dengan upaya untuk menunjang kunjungan wisatawan manca negara ke Indonesia, pemerintah melalui Departemen Kebudayaan dan Pariwisata mendukung kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kebudayaan yang dapat dijual sebagai perkembangan pariwisata. Pertumbuhan sektor pariwisata yang sangat dinamis dan pesat telah memperkuat prediksi dan prospek perkembangan industri pariwisata menjadi sektor ekonomi terbesar dengan pertumbuhan paling pesat dalam perekonomian jasa. Pariwisata merupakan fenomena yang dapat menimbulkan berbagai dampak yang sangat besar dalam pembangunan nasional baik di bidang ekonomi, sosial budaya, politik, keamanan, lingkungan dan bidang-bidang lain.

Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004 – 2009 dijelaskan bahwa salah satu sasaran pemerintah untuk meningkatkan sektor non migas adalah dengan meningkatkan kontribusi pariwisata dalam perolehan devisa menjadi sekitar USD 10 miliar pada tahun 2009, sehingga sektor pariwisata diharapkan mampu menjadi salah satu penghasil devisa besar. Berdasarkan hal tersebut maka kebijakan pembangunan kepariwisataan diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pemasaran melalui kegiatan promosi dan pengembangan produk-produk wisata serta meningkatkan sinergi dalam jasa pelayanan pariwisata.

Maka untuk mengukur kinerja pencapaian sasaran tersebut telah dilakukan perumusan dan penetapan indikator kinerja berikut target dan realisasi yang akan dan telah dicapai dalam tahun 2007 sebagai berikut:

No.	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Peningkatan jenis destinasi ekowisata	5 kali	5 kali	100
2.	Peningkatan jenis destinasi wisata bahari	5 kali	5 kali	100
3.	Peningkatan jenis destinasi konvensi (MICE)	5 kali	5 kali	100

Pertumbuhan sektor pariwisata yang sangat dinamis dan pesat telah memperkuat prediksi dan prospek perkembangan industri pariwisata menjadi sektor ekonomi terbesar dengan pertumbuhan paling pesat dalam perekonomian jasa. Kondisi tersebut dapat dilihat dengan semakin berkembangnya destinasi wisata yang dapat dikunjungi oleh wisatawan. Dengan semakin banyaknya wisatawan maka diharapkan pengeluaran yang dilakukan akan dapat meningkatkan tingkat perekonomian pada lokasi wisata yang dituju. Capaian kinerja pada sasaran ini cukup baik dimana semua indikator kinerja menunjukkan tingkat capaian 100 % dari yang ditargetkan.

Dalam konteks penetapan lokasi pariwisata, maka perlu diperhatikan bahwa setiap daerah atau destinasi pariwisata memiliki ciri khas dan karakteristik tersendiri yang berbeda satu dengan lainnya. Kondisi inilah yang dapat dijadikan suatu promosi pariwisata dengan mengedepankan keindahan serta keunikan masing-masing daerah di Indonesia. Dengan adanya otonomi daerah maka diharapkan pemerintah daerah dapat mengatur daerahnya masing-masing serta dapat mengidentifikasi dan menginventarisir keunikan dan keindahan masing-masing wilayahnya.

Pada sasaran ini, apabila diperhatikan, tahun 2005 ternyata lebih baik daripada tahun 2007 yang dapat dilihat dari adanya penurunan pada satu indikator kinerja yaitu pendukung pengembangan destinasi wisata bahari. Namun kondisi tersebut akan terus diperbaiki pada tahun-tahun mendatang karena potensi wisata bahari di Indonesia tidak akan pernah habis. Yang diperlukan adalah pengkajian serta penerapan dari potensi wisata bahari yang ada di Indonesia lebih ditingkatkan lagi. Rincian lebih lanjut dari perbandingan ini dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Indikator	2005	2006	2007
1.	Peningkatan jenis destinasi ekowisata	7 kali	5 kali	5 kali
2.	Peningkatan jenis destinasi wisata bahari	5 kali	5 kali	5 kali
3.	Peningkatan jenis destinasi konvensi (MICE)	3 kali	5 kali	5 kali

- **Workshop Peningkatan Daya Saing Produk Seni Kerajinan Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pariwisata**



Guna membangun kemitraan bersama dalam pengembangan dan pelestarian asset budaya bangsa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat produk kerajinan yang dijadikan cinderamata yang diminati wisatawan, maka direktorat pemberdayaan masyarakat telah melaksanakan workshop peningkatan daya saing produk seni kerajinan dalam upaya

pemberdayaan masyarakat bidang pariwisata.

Workshop diikuti oleh perwakilan dari instansi pemerintah, lembaga pembina seni kerajinan di Indonesia dan perwakilan dari institut pendidikan.

Kegiatan dimaksud telah menghasilkan beberapa rumusan, antara lain perlunya peningkatan koordinasi antara instansi dan lembaga terkait sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka pemberdayaan masyarakat, khususnya yang terkait dengan produk kerajinan yang berkualitas dan berdaya saing memiliki ciri *originality* / keaslian / kearifan lokal.



- **Tourism Development Supporting Biodiversity Conservation In Pangandaran**

Dalam rangka pemulihan pasca gempa dan tsunami di Pangandaran *UNWTO Consulting Unit on Biodiversity and Tourism for Tsunami Affected Countries* menyediakan dana untuk membantu pemulihan wilayah negara-negara anggotanya yang terkena Tsunami tahun 2006. Bantuan yang diberikan difokuskan pada bidang *Biodiversity* dan *Tourism*. Sebagai pilot project di Indonesia, kawasan Pangandaran khususnya wilayah cagar alam Pananjung yang kaya akan *biodiversity* dipilih sebagai daerah sasaran proyek ini.

Terkait dengan bantuan teknis tersebut telah dilakukan kegiatan yaitu:

1. Telah diselenggarakan Workshop pada tanggal 1 Agustus 2007 di Ciamis dalam upaya untuk menjaring informasi kebutuhan masyarakat setempat dalam rangka pemulihan kawasan Pangandaran yang selanjutnya akan dirumuskan oleh tim ahli dari UNWTO menjadi Project Logical Framework (PLF).
2. Telah dilaksanakan workshop lanjutan pada 7 September 2007 di Pangandaran untuk menginformasikan hasil rumusan PLF kepada stakeholders guna memperoleh masukan kembali apakah PLF ini sudah sesuai dengan kebutuhan program pemulihan Pangandaran.

Disamping itu juga telah dibentuk *Local Working Group* yang keanggotaannya mewakili kelompok usaha/profesi masyarakat untuk menjadi mitra dengan tim UNWTO dalam pelaksanaan project bantuan pemulihan Pangandaran.

3. Diselenggarakan pertemuan antara tim expert UNWTO dengan Local working Group pada tanggal 29 Nopember 2007 di Pangandaran guna menginformasikan rencana kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh *Local working Group* selama pelaksanaan bantuan teknis UNWTO.

- **Kegiatan Sail Indonesia Tahun 2007**

Kegiatan Sail Indonesia tahun 2007, diikuti oleh 22 negara dengan 121 kapal. Peserta rally layar Internasional sail Indonesia (Yacht Race) bertolak dari Darwin, Australia hari Sabtu tanggal 21 Juli 2007. Acara pelepasan para peserta rally sail Indonesia dilakukan oleh Konsul RI di Darwin, Harbalang Napitupulu. Rute Sail Indonesia melalui 8 propinsi, 13 kabupaten dan 3 kota. kegiatan sail indonesia berdampak sangat positif bagi pengembangan pariwisata, khususnya pengembangan wisata bahari di indonesia.

Kegiatan sail Indonesia dimulai dari kota Kupang. para peserta rally berada di kota kupang dari tanggal 24 – 28 Juli 2007. Para peserta rally banyak mengisi acara-acara, baik yang dilakukan oleh Pemerintah propinsi/kota/kabupaten maupun yang dilakukan oleh industri pariwisata dan masyarakat sendiri. Dari kota kupang rally diteruskan dan singgah di Alor. para peserta rally berada di Alor dar tanggal 3 – 7 Agustus 2007. Para peserta rally diterima oleh Bupati kab. Alor. di Alor banyak kegiatan dan acara yang dilakukan, termasuk mengunjungi destinasi-destinasi yang ada di Kab Alor. Dari Kab. Alor peserta rally diteruskan dan singgah di Lembata. di Lembata peserta rally berada dari tanggal 10 – 14 Agustus 2007. para peserta diterima oleh bupati. banyak kegiatan dan acara yang dilakukan termasuk pelaksanaan expo yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten. Dari lembata peserta rally meneruskan perjalanan ke Maumere. Peserta rally berada di maumere dari tanggal 17 – 20 Agustus 2007. Di Maumere seperti di daerah-daerah lain yang dikunjungi, peserta rally diterima oleh Bupati Sikka. Banyak acara dan kegiatan yang dilaksanakan, termasuk menyaksikan lomba dayung tradisional yang dilakukan oleh masyarakat.

Dari Maumere peserta rally melanjutkan perjalanan ke Maurole-Ende. Di sini para peserta berada dari tanggal 22 – 27 Agustus 2007. Di Maurole-Ende ini pelaksanaan acara di barengi dengan pentahbisan pastor serta diadakannya flobamora festival yang merupakan suatu hiburan yang sangat baik bagi para peserta rally dan masyarakat. Dari Maurole – Ende peserta rally meneruskan perjalanan ke Labuan bajo. di Labuan Bajo peserta berada dari tanggal 6 – 9 September 2007. para peserta rally mengunjungi beberapa destinasi di wilayah ini.

Dari Labuan Bajo peserta rally meneruskan perjalanan ke Bima. peserta rally berada di Bima dari tanggal 10 – 14 September 2007. Di Bima para peserta rally disuguhkan beberapa acara kesenian dan budaya tradisional. Dari Bima peserta rally diteruskan ke Mataram. Para peserta rally melaksanakan beberapa acara di Mataram. para peserta berada di Mataram tanggal 20 September 2007. Dari Mataram para peserta melanjutkan perjalanan ke Lovina-Bali. Banyak

kegiatan dan acara yang dilaksanakan di Lovina-Bali, termasuk menyaksikan pagelaran tarian massal. Dari Lovina-Bali, para peserta rally meneruskan perjalanan ke Karimun Jawa. Para peserta berada di Karimun Jawa dari tanggal 2 – 6 Oktober 2007. Seperti di destinasi lain yang dikunjungi, di Karimun Jawa juga banyak acara yang dilaksanakan, termasuk melihat pelepasan Tukik (penyu kecil).

Dari Karimun Jawa, para peserta meneruskan perjalanan ke Kumai, dan diteruskan ke Belitung. Para peserta berada di Belitung dari tanggal 16 – 21 Oktober 2007. Di Belitung para peserta rally mendapat kehormatan dikunjungi dengan hadirnya Gubernur Bangka-Belitung dan Menteri Kelautan dan Perikanan. Banyak acara dan kegiatan yang dilakukan di daerah ini. Dari Belitung para peserta melanjutkan perjalanan ke Batam. Di daerah ini banyak acara dan kegiatan yang dilaksanakan.

- **EAST NUSA TENGGARA EXPO (ENTEX) 2007**

Penyelenggaraan ENTEX I 2007 dan Festival Seni Budaya Nusa Tenggara Timur merupakan ajang promosi yang efektif untuk memperkenalkan hasil industri, pariwisata dan kebudayaan, serta informasi pembangunan daerah dan peluang investasi di Nusa Tenggara Timur. Sebagai Gerbang Asia, Australia dan Pasifik tentunya haruslah terus dipacu dengan berbagai event yang dapat dimanfaatkan sebagai ajang promosi oleh berbagai pihak di Kawasan Nusa Tenggara Timur.

Expo ini dilaksanakan di Flobamora Mall, Kupang, Nusa Tenggara Timur 27 – 31 Juli 2007 dan secara resmi dibuka oleh Dirjen Pengembangan Destinasi Pariwisata, Ir Sambudjo Parikesit. ENTEX ini memiliki keunggulan tersendiri karena dipadukan dengan Festival Seni Budaya NTT dengan kegiatan antara lain: Expo Produk Unggulan Pariwisata, Pagelaran Seni Budaya, Forum Koordinasi dan Temu Bisnis, Workshop Aneka Souvenir Tenun Ikat, serta Aneka Hiburan dan Lomba.

Event ini diharapkan akan dikunjungi oleh berbagai lapisan masyarakat baik yang berasal dari Provinsi NTT, Luar NTT maupun dari luar negeri terutama para sailors dari berbagai penjuru dunia yang sedang berada di Nusa Tenggara Timur, dari perjalanan mereka antar benua lewat program *Sail Indonesia 2007*.

- **SECOND ASEAN TOURISM INVESTMENT FORUM 2007**

Pada tanggal 20 – 24 September 2007 bertempat Ramada Bintang Hotel, Bali telah dilaksanakan *Second ASEAN Tourism Investment Forum 2007* (ATIF) yang bertema *Attracting ASEAN Tourism Investment In A Challenging World*. Dalam Kegiatan ATIF 2007 ini Departemen Kebudayaan dan Pariwisata secara resmi mengundang 10 negara ASEAN, Wakil pemerintah di 15 provinsi di Indonesia, stakeholder pariwisata Indonesia, para investor potensial dari wilayah ASEAN maupun dunia. Adapun jumlah peserta dalam forum ini kurang lebih sebanyak 200 peserta.

Pada forum ini juga dilaksanakan pameran pariwisata. Pameran ini akan menampilkan produk-produk wisata potensial dari berbagai daerah tujuan wisata di Indonesia dan seluruh negara ASEAN. Pameran ini akan diikuti oleh 27 peserta dari beberapa wilayah. Acara ini dibuka Sekretaris A. Qudri

A. Azizy dan dilanjutkan dengan sambutan dari Sekjen ASEAN, Mr. Ong Keng Yong.

Acara ini dilaksanakan selama 2 hari, pada hari pertama tanggal 21 September 2007 digelar *Tourism & Investment Conference* dan pada hari kedua dilaksanakan *Tourism Investment Potential Tour*, dengan mengajak para delegasi berkeliling menuju tempat-tempat wisata di Bali seperti Water Boom, Bulgari Hotel & Resort dan Bali Bird Park.

Secara umum keseluruhan pencapaian sasaran tersebut tidak mengalami hambatan atau kendala yang cukup berarti namun demikian masih terdapat beberapa hambatan kecil yang kemungkinan dapat menjadi penghambat besar di periode mendatang apabila tidak segera ditindaklanjuti. Hambatan-hambatan kecil tersebut antara lain:

1. Produk pariwisata Indonesia walaupun beraneka ragam dan banyak jenisnya namun belum di garap secara optimal.
2. Dukungan dari instansi terkait masih minim sehingga program-program yang direncanakan oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata belum dapat dijalankan secara optimal.
3. Adanya benturan antara kebijakan pusat dengan peraturan daerah dalam rangka pengembangan destinasi.

Untuk dapat menindaklanjuti atau memberikan penyelesaian terhadap hambatan-hambatan tersebut kami merekomendasikan beberapa alternatif penyelesaian yaitu:

1. Perlu adanya penggarapan/pengelolaan produk pariwisata Indonesia secara komprehensif dan terpadu
2. Perlunya sinkronisasi pada tingkat perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata antara pusat dan daerah.

Anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran ini dapat dilihat bahwa dari pagu anggaran sebesar Rp 80.215.400.000,00 hanya digunakan sebesar Rp 68.395.768.269,00 atau hanya sebesar 85,27%. Dengan tingkat capaian output maupun outcome yang rata-rata 100% dapat dikatakan bahwa sudah terdapat efisiensi dalam penggunaan anggaran.

## **Sasaran 8:            Meningkatnya        peran        Indonesia        dalam kerjasama dan persahabatan antar bangsa dengan dilandasi oleh sikap saling menghargai**

---

---

Di tahun 2007 ini sasaran pemulihan citra pariwisata Indonesia merupakan sasaran pertama untuk memantapkan citra positif pariwisata Indonesia. Berbagai kejadian yang tidak menguntungkan terjadi di Indonesia pada kurun waktu terakhir ini, seperti beberapa musibah yang dialami beberapa penerbangan nasional. Demikian pula bencana alam serta berbagai peristiwa lainnya di tanah air sangat tidak menguntungkan bagi citra kepariwisataan di Indonesia.



Namun dengan upaya yang terus menerus dan tanpa putus asa, berbagai usaha tersebut akhir-akhir ini telah memperlihatkan perkembangan yang cukup baik. Namun kita harus tetap berani melangkah ke depan untuk melihat tantangan yang harus kita hadapi dalam rangka meletakkan landasan yang kokoh, terutama dalam skenario penyusunan tahapan dan focus pengembangan kepariwisataan.

Langkah strategis dalam pengembangan kepariwisataan nasional adalah meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional, mempermudah pergerakan wisatawan menuju dan selama berada di Indonesia, mengembangkan destinasi baru di luar pulau Jawa dan Bali, mengembangkan kegiatan wisata yang potensial, serta menumbuhkembangkan pariwisata nusantara.

Maka untuk mengukur kinerja pencapaian sasaran tersebut telah dilakukan perumusan dan penetapan indikator kinerja berikut target dan realisasi yang akan dan telah dicapai dalam tahun 2007 sebagai berikut:

No.	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Peningkatan jumlah kerjasama internasional dibidang budaya dan pariwisata	20 kali	20 kali	100
2.	Jumlah investasi baru di bidang pariwisata	1 kali	1 kali	100
3.	Jumlah implementasi hasil kesepakatan kerjasama multilateral, bilateral, sub regional di bidang pariwisata	92 %	92 %	100

Disadari bahwa peningkatan citra pariwisata Indonesia di mata dunia tidaklah mudah. Oleh karena itu Departemen Kebudayaan dan Pariwisata telah melakukan upaya-upaya kearah tersebut dengan menargetkan adanya kerjasama internasional dibidang kebudayaan dan pariwisata sebanyak 20 kerjasama yang telah berhasil dicapai. Pengembangan produk dan pelayanan pariwisata yang menerapkan kode etik pariwisata dunia merupakan salah satu kegiatan yang dijadikan unggulan dalam pencapaian sasaran ini.

Selain itu, dengan berhasilnya kedua jenis kegiatan tersebut maka manfaat yang dirasakan yaitu terberdayakannya masyarakat pada daerah wisata dapat dicapai pula dengan angka capaian 100%.

Bila dibandingkan dengan tahun 2005 maka terdapat beberapa indikator yang menunjukkan kenaikan namun terdapat pula indikator yang mengalami penurunan. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No.	Indikator	2005	2006	2007
1.	Peningkatan jumlah kerjasama internasional dibidang budaya dan pariwisata	21 kali	17 kali	20 kali
2.	Jumlah investasi baru di bidang pariwisata	1 kali	1 kali	1 kali

No.	Indikator	2005	2006	2007
3.	Jumlah implementasi hasil kesepakatan kerjasama multilateral, bilateral, sub regional di bidang pariwisata	10 %	100 %	92 %

Sebagaimana dapat dilihat dari tabel diatas bahwa secara umum kinerja dalam rangka kerjasama internasional telah mengalami peningkatan yang cukup berarti. Namun demikian perlu dicermati bahwa jumlah investasi yang masuk ke Indonesia di bidang pariwisata ternyata masih cukup rendah apabila dibandingkan dengan potensi pariwisata yang dapat digali. Untuk itu dalam periode selanjutnya perlu dilakukan upaya yang lebih maksimal untuk dapat mengundang investor-investor yang mau menanamkan investasinya di Indonesia terutama di bidang pariwisata.

Secara umum keseluruhan pencapaian sasaran tersebut tidak mengalami hambatan atau kendala yang cukup berarti namun demikian masih terdapat beberapa hambatan kecil yang kemungkinan dapat menjadi penghambat besar di periode mendatang apabila tidak segera ditindaklanjuti. Hambatan-hambatan kecil tersebut antara lain:

- Belum tersedianya informasi yang komprehensif mengenai keadaan dan evaluasi posisi pengusaha kecil dan menengah bidang kebudayaan dan pariwisata, sehingga dalam penerapan/perencanaan kebijakan pengembangan masih belum menyentuh akar permasalahan.
- Masih rendahnya pemahaman terhadap penerapan kode etik pariwisata dunia untuk menjaga pengembangan pembangunan.

Untuk dapat menindaklanjuti atau memberikan penyelesaian terhadap hambatan-hambatan tersebut kami merekomendasikan beberapa alternatif penyelesaian yaitu:

- Perlu adanya data base yang komprehensif mengenai pengusaha kecil dan menengah untuk membantu dalam pengambilan keputusan kebijakan pengembangan.
- Perlunya peningkatan kesadaran pentingnya penerapan kode etik pariwisata dunia untuk menjaga keseimbangan pembangunan.

Anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran ini dapat dilihat bahwa dari pagu anggaran sebesar Rp 170.399.620.000,00 hanya digunakan sebesar Rp 156.031.981.506,00 atau hanya sebesar 91,57%. Dengan tingkat capaian output maupun outcome yang rata-rata 100% dapat dikatakan bahwa sudah terdapat efisiensi dalam penggunaan anggaran.

### **Realisasi Keuangan 2007**

Pada tahun 2007 Departemen Kebudayaan dan Pariwisata telah melaksanakan 9 program pokok yang didukung oleh kegiatan-kegiatan pada masing-masing program yang merupakan inti dari pembangunan kebudayaan

dan pariwisata, maka untuk mewujudkan dari berbagai program tersebut Departemen Kebudayaan dan Pariwisata memperoleh alokasi anggaran sebagai berikut :

NO	URAIAN	PAGU	REALISASI	(%)
1.	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	170.399.620.000	156.031.981.506	91,57
2.	Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan	316.177.050.000	272.038.051.362	86,04
3.	Program Pengembangan Nilai Budaya	49.154.995.000	42.501.056.550	86,46
4.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	50.010.334.000	45.356.160.822	90,69
5.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	93.742.714.000	75.335.768.260	80,36
6.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	80.215.400.000	68.395.768.269	85,27
7.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	163.807.165.000	146.708.111.887	89,56
8.	Program Peningkatan Kemitraan	94.902.081.000	83.496.356.659	87,98
9.	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara	7.275.475.000	6.305.981.794	86,67
	<b>Total</b>	<b>1.025.684.834.000</b>	<b>896.169.237.109</b>	<b>87,37</b>

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa 9 program tersebut dengan dukungan dana sebesar Rp 1.025.684.834.000,00 dapat terserap sebesar Rp 896.169.237.109,00 dengan demikian secara total prosentase yang dapat diserap sebesar 87,37 %, hal tersebut karena terjadinya pemotongan Belanja tidak mengikat sebesar 70% sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-348/MK.02/2007 tanggal 30 Juli 2007, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) baru mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Anggaran pada bulan November 2007, yang mengakibatkan terjadinya hambatan kelancaran pencairan dan pertanggungjawaban, sehingga sampai akhir tahun dana tidak dapat terserap seluruhnya.

## Bab V: Penutup

---

Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata menempati posisi strategis dalam rangka mempererat persatuan dan kesatuan bangsa serta untuk memberdayakan ekonomi rakyat. Mengingat posisi strategis tersebut diharapkan pembangunan kebudayaan dan pariwisata dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan dapat dilaksanakan. Di samping itu melalui pembangunan kebudayaan dan pariwisata diharapkan dapat mengurangi gejolak sosial di masyarakat sebagai akibat menurunnya kekuatan mental dan luntarnya karakter bangsa serta dapat mengurangi krisis ekonomi yang berkepanjangan dan menciptakan kehidupan yang lebih baik.

Disadari bahwa pembangunan kebudayaan dan pariwisata saat ini masih dihadapkan pada berbagai situasi antara lain:

1. persoalan yang kompleks dan bersifat multidimensional yang masih berlanjut sebagai akibat dari perubahan struktur kehidupan berbangsa setelah terjadinya krisis yang berkepanjangan serta meningkatnya ancaman keamanan global;
2. Meningkatnya persaingan dari negara-negara tetangga yang sama-sama menjual keindahan alam dan budayanya sebagai produk wisata.

Walaupun demikian, pariwisata merupakan sektor yang paling siap dari segi fasilitas, sarana dan prasarana, sehingga sangat beralasan apabila pariwisata dijadikan sebagai sektor andalan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Departemen Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun anggaran 2007 telah menunjukkan kinerja yang baik melalui pelaksanaan serangkaian program-program yang diembannya yaitu:

1. Program pengembangan nilai budaya;
2. Program pengelolaan keragaman budaya;
3. Program pengelolaan kekayaan budaya;
4. Program pengembangan destinasi pariwisata;
5. Program pengembangan pemasaran;
6. Program peningkatan kemitraan;
7. Program penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan pemerintahan;
8. Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
9. Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara.

Secara umum kinerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun 2007 dapat dinyatakan berhasil hal ini dapat dilihat dari tercapainya kinerja sasaran-sasaran sebagaimana telah ditetapkan. Sementara itu berdasarkan realisasi terhadap rencana sasaran tahunan 2007 diketahui bahwa secara rata-rata telah tercapai sasaran. Dengan demikian capaian kinerja masing-masing sasaran telah berhasil dilaksanakan dari rencana yang telah ditetapkan di tahun 2007.

Beberapa kegiatan budaya yang telah dilaksanakan dan menjadi salah satu kegiatan fenomenal antara lain: Gelar Budaya Makassar, dan Pawai

Budaya Nusantara. Dengan dilaksanakannya kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan bahwa minat dan ketahanan masyarakat dibidang kebudayaan akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya serangan budaya dari luar melalui globalisasi kebudayaan dan ekonomi.

Sementara itu, kegiatan-kegiatan kepariwisataan tahun 2007 yang dapat dianggap sebagai salah satu kegiatan yang cukup fenomenal antara lain: program *roadshow* ke beberapa negara sahabat, dan pengembangan destinasi dan alternatif wisata dalam negeri. Diharapkan bahwa perkembangan kepariwisataan yang semakin baik maka minimal akan meningkatkan tingkat perekonomian pada daerah lokasi wisata.